

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI RW 02 KELURAHAN NEGLASARI KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG¹

Raden Mila Karmila

Pelaksana di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Alumni STIA LAN Bandung, Program Studi MPD

Women's Participation in Household Waste Management in RW 02 Villages Neglasari Bandung City Distric Cibeunying Kaler

Abstract

This research aims at identifying and analyzing women's participation in domestic waste management at RW 02 Kelurahan Neglasari Cibeunying Kaler Subdistrict, Bandung City. It is a qualitative case study. The result of the research shows women participate in the domestic waste management differently along the management stages: planning, implementing, evaluating, and utilizing. The number of women who participates at the planning stage is quite high. However, the level of women's participation decreases in the following stages – implementing and evaluating. Surprisingly, in the utilizing stage, the level of women's participation mounts. Not only women but all residents at RW 02 get the benefits from the waste management activities. This can be the trigger as well as the appeal for all residents, not only women, to get involved in such activities. Based on Arnstein's ladder of citizen participation, the women's participation at RW 02 in domestic waste management from planning to utilizing stage can be classified into the citizen control rung, in which women initiate, do, and control all the processes.

Keywords: women's participation, waste management

A. LATAR BELAKANG

Masalah persampahan merupakan masalah yang cukup pelik yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, seperti Medan, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Persoalan sampah sudah menjadi masalah publik yang perlu mendapat perhatian serius dari setiap pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kehadiran sampah sebagai hasil dari aktifitas domestik, komersial maupun industri tidak bisa dihindari, bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya seiring dengan berjalannya ekonomi pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu di kota-kota besar tersebut. Sementara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum mempunyai rencana strategi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut, bahkan terkesan bahwa penyelesaian masalah sampah pada saat ini masih bersifat konvensional, sporadis, tidak terintegrasi dan tidak terkoordinasi serta kurang memanfaatkan potensi yang ada, baik yang ada di lembaga pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

Permasalahan sampah dari tahun ke tahun selalu saja terjadi dan seolah-olah pemerintah

tidak mempunyai keinginan untuk menuntaskannya sampai ke akar permasalahannya. Hal itu terbukti dengan masih terjadinya beberapa musibah yang berkaitan dengan sampah, seperti kasus longornya timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, di TPA Leuwigajah-Cimahi, dan di TPA Rancamaya, Bogor, yang menewaskan puluhan orang dan merusak pemukiman penduduk di sekitarnya. Bahkan di antara kasus-kasus tersebut ada yang diikuti dengan aksi penutupan TPA oleh masyarakat sekitarnya sebagai tanda ketidaksetujuan masyarakat atas kehadiran TPA di lingkungan tempat tinggal mereka.

Berbagai kasus di atas mempertegas sekaligus sebagai bukti bahwa pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia pada saat ini masih menggunakan paradigma lama, yaitu: kumpul-angkut-buang, bukannya pilah-kumpul-angkut-buang. Idealnya, dalam pengelolaan sampah, sebelum melakukan pengumpulan sampah seharusnya ada langkah yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu memilah sampah. Proses ini dilakukan mulai dari timbulan sampah. Karena dengan adanya pemilahan maka volume sampah yang akang

1. Artikel ini merupakan ringkasan dari Skripsi yang berjudul "Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di RW.02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung", ditulis di bawah bimbingan Ono Taryono, S.Pd. M.A. dan Hendrikus T. Gedeona, S.I.P.,M.Si.

dibuang akan berkurang besarannya, baik ketika dimulai dari timbunan sampah hingga ke TPS, atau pun dari TPS ke TPA. Source reduction atau pemilahan sampah, pada saat ini belum berjalan dengan baik, meskipun telah ada upaya pengomposan dan daur ulang, tapi masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Sehingga ketika sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sama jumlahnya ketika dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), padahal lahan TPA tidak mengalami penambahan sehingga semakin hari gunung sampah makin meninggi yang berakibat terjadinya longsor sampah sehingga menimpa pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya yang menimbulkan kerugian materi dan non materi.

Jumlah sampah yang dihasilkan di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Hal itu karena pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan tiga kali cepat dibanding dengan di pedesaan sehingga volume sampah yang dihasilkannya pun lebih besar. Menurut data Statistik Persampahan Domestik Indonesia (2008) kota-kota besar di Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 14,1 juta ton per tahun, dengan rincian jenis sampah organik/dapur sebesar 58%, plastik 14%, kertas 9%, dan sisanya jenis sampah lainnya.

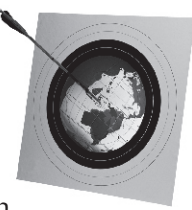
Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang belum mampu mengelola sampahnya dengan baik dan menyeluruh. Hal tersebut terbukti dengan Kota Bandung pernah menyandang julukan "Bandung Lautan Sampah". Peristiwa itu terjadi sebagai dampak dari terjadinya bencana longsor di TPA Leuwigajah pada tanggal 21 Februari 2005. TPA Leuwigajah yang memiliki luas area mencapai 23,5 ha yang telah dipenuhi oleh sampah hingga mencapai ketinggian 35 meter tiba-tiba runtuh setelah diterpa hujan deras sehari sebelumnya, dan reruntuhan sampah tersebut menimpa permukiman penduduk yang berada di bawahnya. Kampung Leuwigajah dan Batujajar lenyap. Sedikitnya 143 warga dua desa yang tewas di bawah timbunan sampah di TPA tersebut. Bahkan kunjungan Wapres waktu itu juga memicu demonstrasi besar-besaran yang menolak penggunaan TPA lebih lanjut. Sehari setelah bencana terjadi sampah mulai terlihat menumpuk di TPS-TPS, tidak hanya di TPS-TPS tetapi juga di berbagai sudut Kota Bandung yang mengakibatkan tidak ada satu pun ruang publik yang terlepas dari sampah. Seminggu kemudian, sampah mulai menguasai Kota Bandung, dan

dalam jangka waktu sebulan Bandung berubah menjadi lautan sampah. Sampah tidak dapat terangkut karena tidak adanya tempat pembuangan sampah akhir pada waktu itu sehingga sampah menumpuk dimana-mana. Sistem pengelolaan di Kota Bandung mengalami kehancuran karena pemerintah kota hanya mempunyai satu TPA dan tidak mempunyai TPA lain sebagai cadangan.

Persoalan sampah di Bandung memang tidaklah sederhana. Menurut data yang diperoleh dari PD Kebersihan Kota Bandung, rata-rata timbunan sampah di Kota Bandung mencapai 7.500 meter kubik atau setara dengan 1.800 ton per hari. Angka ini muncul dengan estimasi jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2,5 juta orang, di mana setiap penduduk diperkirakan memproduksi 3 liter sampah per hari. Menjelang lebaran, volume sampah di Kota Bandung naik hingga 20 persen.

Sampai saat ini penanganan sampah di Kota Bandung masih menggunakan pendekatan berupa open dumping, di mana sampah dikumpulkan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) untuk kemudian ditumpuk hingga hancur sendiri di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Yang menjadi permasalahannya adalah bahwa pendekatan penanganan dengan cara seperti ini sudah tidak memadai lagi dengan adanya volume sampah yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Prediksi kasar menunjukkan bahwa dengan cara penanganan seperti ini, jika seluruh kawasan Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang) memproduksi sampah, total volumenya mencapai 4,5 juta ton kubik per hari. Dengan menggunakan cara open dumping, diperkirakan bahwa dalam waktu 25 tahun diperlukan 100 hektare tanah sebagai lokasi TPA.

Untuk menyediakan TPA baru atau memperluas TPA di kawasan yang selama ini sudah disepakati, Pemerintah Kota Bandung menghadapi tantangan yang serius karena Kota Bandung tidak mempunyai lahan di wilayahnya sendiri untuk dapat dijadikan TPA. Kendatipun upaya komunikasi politik antara Pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah daerah sekitarnya sudah sering dilakukan, tidak ada jaminan bahwa kesepakatan dapat terlaksana. Pada bulan Mei 2006, misalnya, sejumlah warga memprotes agar kawasan TPA Pasirbajing di Kabupaten Garut ditutup dan tidak diperbolehkan lagi lingkungan sekitarnya



dijadikan tempat pembuangan akhir sampah dari daerah-daerah lain. Pasirbajing hanya mampu menerima 200 meter kubik sampah setiap harinya dengan armada truk dari PD Kebersihan sebanyak 22 buah. Tetapi dalam praktik sampah terus mengggung dan kemudian meluas ke kawasan permukiman warga.

Permasalahan lainnya yang tidak kalah peliknya adalah mekanisme pengangkutannya, di mana PD Kebersihan menghadapi keterbatasan armada pengakut dan personel yang mengangkut sampah-sampah tersebut ke TPA. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan pada saat ini sudah memiliki armada 103 buah truk kuning yang bekerja praktis tanpa henti. Sebagian pengusaha dan masyarakat juga menyumbang secara sukarela dengan menyediakan 20 truk sampah secara swadaya. Bahkan dalam beberapa kegiatan penting, Kodam III Siliwangi juga seringkali diminta untuk ikut mengangkut sampah ke TPA.

Dari berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kota, tampaknya timbulan sampah yang berada di Kota Bandung belum dapat terangkut semuanya ke pembuangan akhir sampah. Menurut data PD Kebersihan Kota Bandung (2010) hanya 62% dari timbulan sampah setiap hari, atau sekitar 4.100 meter kubik atau 1000 ton sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti setiap hari, 8% dari sisa sampah yang tidak terangkut masuk ke program 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) yang sudah berjalan di masyarakat. Sedangkan sisanya ada yang dibuang ke sungai, dibakar, atau masih menumpuk di TPS karena belum terangkut.

Mengurus dan mengelola sampah di Kota Bandung memang bukan persoalan yang mudah. Apalagi pada saat ini lokasi satu-satunya TPA bagi sampah Kota Bandung berada di wilayah daerah lain, yaitu Kabupaten Bandung Barat, yang berjarak 45 km. Selain memakan biaya transportasi yang besar, pengangkutan sampah ini juga rawan konflik sosial dan politik. Diakui bahwa telah banyak kebijakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kota dalam mengatasi masalah sampah ini, mulai dari kebijakan yang sifatnya sederhana yaitu menggalakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang di rumahnya masing-masing hingga pengadaan teknologi tinggi yang dapat menghancurkan sampah bahkan dapat menghasilkan energi listrik dari hasil pembakaran tersebut (*incinerator*). Tetapi

upaya implementasi ke masyarakat tidaklah mudah. Banyak kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. Contohnya sosialisasi pemilihan sampah dengan prinsip 3R di setiap rumah, dimana kelihatannya mudah ketika diucapkan tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan kesabaran dan sosialisasi yang terus menerus agar masyarakat mempunyai kesadaran dan mau mengubah perilakunya untuk melakukan hal tersebut.

Berbicara tentang kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, sebenarnya tidak semua warga masyarakat tidak peduli mengenai masalah persampahan. Ada sekelompok dari mereka yang telah sadar dan mempunyai inisiatif sendiri untuk mengatasi masalah persampahan yang ada di lingkungannya secara baik dan benar tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan adanya sekelompok masyarakat tertentu yang berhasil melibatkan warganya untuk berpartisipasi dalam menangani pengelolaan sampah di lingkungannya secara mandiri.

Keberhasilan penanganan masalah sampah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya secara mandiri ternyata telah ada di beberapa tempat yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti di D.I. Yogyakarta tepatnya di Dusun Badegan Bantul yang dikenal sebagai Pelopor Bank Sampah. Di dusun tersebut masyarakatnya berhasil mengelola sampahnya secara mandiri bahkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi warga masyarakatnya. Menurut situs (diunduh tgl 26 Juni 2011) program pengelolaan sampah secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah bank sampah, telah dilaksanakan di beberapa tempat, seperti di Kota Yogyakarta yang saat ini bank sampahnya sudah mencapai 70 buah, di Jakarta dan sekitarnya sekitar 60 buah, sementara di Pekalongan baru 20 buah. Baru-baru ini Menteri Lingkungan Hidup RI, Gusti M. Hatta meresmikan pendirian Bank Sampah barokah As-salam di Kota Padang, Sumatera Barat. Melalui bank sampah ini masyarakat terlibat secara langsung dalam penanganan masalah sampah. Masyarakat diajarkan bagaimana membuat pengolahan sampah terpadu yang berwawasan lingkungan, mengurangi sumber sampah, melakukan daur ulang dan guna ulang, serta melakukan pengomposan. Yang kesemuanya itu, manfaat dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi program tersebut tidak akan

berjalan dengan baik apabila tidak ada peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari program itu dapat terwujud dan berkesinambungan.

Di Kota Bandung, fakta menunjukkan bahwa telah ada beberapa tempat yang sebagian warga masyarakatnya telah mulai sadar dan berinisiatif untuk dapat mengelola sampahnya secara mandiri. Salah satunya adalah warga masyarakat yang berada di lingkungan RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Di lokasi ini, sebelumnya penanganan masalah sampah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini PD Kebersihan. Tetapi, sejak tahun 2010 masyarakat di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, khususnya para Ibu Rumah Tangga (RT) yang ada di wilayah tersebut berinisiatif memotivasi dan mengusulkan kepada warga masyarakat di wilayah ini agar sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga dapat dikelola secara mandiri sehingga mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.

Inisiatif para Ibu RT RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam pengelolaan sampah di wilayahnya merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis, karena fenomena kebersamaan dan keaktifan para Ibu RT tersebut untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungannya merupakan hal yang langka terjadi di wilayah Kota Bandung. Dikatakan demikian karena setiap kegiatan dalam pengolahan sampah rumah tangga mulai dari pemilahan sampah di rumah, penimbangan sampai pencacatan di setiap rekening warga semua dilakukan oleh kaum perempuan, dalam hal ini dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Begitu pula ketika mendirikan sanggar ketrampilan dan sarana pendidikan PAUD untuk anak-anak usia dini tidak terlepas dari keterlibatan kaum perempuan di dalamnya. Para pengajar pun baik di sanggar keterampilan maupun di lembaga PAUD sebagian besar adalah kaum perempuan. Mereka dengan sukarela mau meluangkan waktu serta tenaganya untuk dapat mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki di sanggar tersebut. Bahkan dengan adanya keterlibatan para perempuan di dalam program pengolahan sampah ini telah menghantarkan RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler menjadi juara ke-II

pada pameran yang diadakan oleh PT. Telkom Indonesia cabang Bandung dengan tema "Bandung Green & Cleans".

Gambaran di atas cukup memperlihatkan bahwa partisipasi kaum perempuan mempunyai peran yang penting dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya, yakni masalah pengelolaan sampah RT. Perempuan merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang tinggi apabila kemampuannya digali dan dikembangkan. Kondisi tersebut, menggugah hati dan pikiran penulis untuk meneliti secara mendalam mengenai Bagaimana partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dan apa saja faktor pendorong dan penghambatnya?

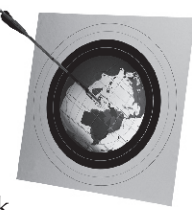
B. LANDASAN TEORI

Penelitian ini terfokus pada topik mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Itu berarti bahwa konsep kunci yang perlu dibahas adalah partisipasi perempuan dan pengelolaan sampah. Khusus untuk konsep partisipasi perempuan dalam konteks penelitian ini, akan digunakan konsep dan teori yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Hal itu dengan alasan karena perempuan merupakan salah satu elemen dari masyarakat itu sendiri. Maka itu, konsep partisipasi masyarakatlah dianggap paling relevan dalam konteks tersebut, karenanya akan dibahas dan digunakan dalam konteks penelitian ini.

1. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pada masa sekarang ini dimana keterbukaan dan demokrasi dijunjung tinggi, pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Karena pembangunan daerah diperuntukan bagi semua masyarakat, karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya maka makna dari apa yang menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri dapat terwujud.

Menjelaskan arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sudah mulai terlihat ketika banyak pakar menilai bahwa pada Masa Orde Baru pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Karena dengan



menggunakan pendekatan tersebut, yang menegaskan peran serta masyarakat, mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Tidak hanya itu saja, tetapi juga telah menimbulkan persoalan-persoalan lainnya, seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial, terjadinya erosi ikatan-ikatan kekeluargaan dan kekerabatan, dan meluasnya dekadensi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Suparjan dan Suyatno: 2003). Akibat lainnya adalah terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap lembaga birokrasi yang sifatnya sentralistik yang memiliki kewenangan yang dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tetapi tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal. Hal tersebut secara sistematis telah mematikan inisiatif masyarakat lokal untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian peran serta masyarakat dan ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi karena adanya pandangan birokrasi terhadap kondisi masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat masih dipandang terbelakang dan tertinggal karena karakteristik masyarakat yang masih bersifat tradisional, tingkat pendidikan yang rendah, masih berorientasi pada masa lalu, dan kurangnya memiliki motivasi untuk berprestasi yang memadai. Oleh karena itu, masyarakat dianggap tidak mampu melakukan kegiatan pembangunan. Sementara yang dianggap mampu hanyalah jajaran birokrasi pemerintah. Berdasarkan pandangan tersebut maka birokrasi menjadi aktor utama yang mendominasi dalam semua aspek pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Permasalahan makin bertambah tatkala proses pembangunan yang tidak menyertakan masyarakat didalamnya, berjalan tidak sesuai dengan konsep pembangunan itu sendiri. Di mana mentalitas birokrasi yang buruk mempengaruhi jalannya pembangunan sehingga pembangunan tidak berjalan dengan efektif, bahkan pembangunan tersebut cenderung tidak memihak kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah tetapi lebih memihak kepada ekonomi yang kuat.

Dengan gagalnya pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, di mana masyarakat dipandang sebagai obyek yang menerima dan melaksanakan

pembangunan, maka muncul gagasan untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan ke arah model pembangunan alternatif yang lebih menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah karena dengan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan dan pendekatan partisipatif akan mendorong tumbuhnya prakasa dan swadaya masyarakat sebagai upaya percepatan pembangunan di daerah. Melalui pendekatan partisipatif ini setiap elemen publik di daerah harus selalu diikutsertakan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, menghasilkan, menikmati dan melestarikan pembangunan. Dengan tahapan ini diharapkan proses pembangunan di daerah akan mencapai sasarannya.

Menurut Diana Conyers (1954:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Contohnya, program pembangunan pusat-pusat pembelanjaan padahal yang lebih dibutuhkan adalah jalan-jalan yang kondisinya baik yang dapat memperlancar perekonomian dalam kegiatannya. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, partisipasi menjadi penting karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Disadari pula bahwa setiap daerah pasti memiliki kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Keterbatasan asset yang mereka miliki, sumber daya manusia yang tidak mumpuni, kurang tanggapnya birokrasi pemerintah dalam merespon keinginan masyarakat, dan kurang meratanya sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dimiliki dalam melayani

kebutuhan masyarakat menyebabkan peranan dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam keterlibatannya. Dalam hal ini, pemerintah dituntut agar berperan secara efektif untuk menjaga efisiensi dalam alokasi sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, melaksanakan keadilan baik dalam melaksanakan kegiatan produksi, penciptaan lapangan kerja maupun distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas nasional dalam perekonomian mikro.

Pembangunan dengan pendekatan yang berbasis pada masyarakat akhirnya menjadi kebutuhan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini. Dengan asumsi bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai monitoring serta evaluasi pembangunan. Perspektif pembangunan yang perlu dikembangkan, masyarakat dibangun bukan karena mereka bodoh dan tidak mampu, akan tetapi kemampuan yang tersedia perlu dioptimalkan agar mereka dapat berkembang sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri. Local knowledge dan teknologi menjadi basis perkembangan mereka. Konsep ini sangat penting di dalam mewujudkan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada manusia. Jika paradigma pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui bantuan modal dan teknologi yang didatangkan dari luar, pembangunan dalam perspektif ini hanya dapat terjadi jika masyarakat berperan aktif. Untuk mendukung tumbuhnya partisipatif masyarakat ini maka pemberdayaan terhadap masyarakat baik secara politis, sosial, ekonomi memang menjadi sesuatu hal yang mutlak dilakukan (Suparjan dan Suyatno: 2003).

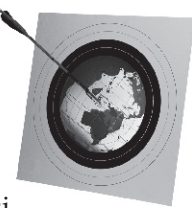
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Lingkungan

Pembangunan dilakukan di segala bidang kehidupan yang salah satu diantaranya adalah pembangunan yang dilakukan di bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut UU No. 23 Tahun 1997 adalah: "Kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya". Pembangunan ini dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap seimbang serta dinamis antara manusia dengan lingkungannya sehingga

kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia dapat dicapai. Untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia maka masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya kesehatan lingkungan yang baik. Lingkungan yang terjaga kebersihannya akan membuat masyarakat yang ada di dalamnya akan terhindar dari berbagai penyakit yang akan menyimpannya. Untuk mewujudkan kesadaran tersebut diperlukan partisipasi dan keinginan yang kuat untuk berkomitmen dari masyarakat itu sendiri agar tujuan dari terciptanya lingkungan yang sehat dapat dicapai.

Meskipun penyelenggaraan upaya kesehatan untuk masyarakat diatur oleh pemerintah tetapi kerjasama dan keikutsertaan masyarakat di dalamnya tetap dibutuhkan. Karena menciptakan lingkungan yang sehat hanya dapat dilakukan bersama-sama, tidak hanya pemerintah semata tapi terutama oleh masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kesehatan di lingkungannya dapat ditujukan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakatnya, yaitu diantaranya dilakukannya kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan disekitarnya agar penyakit tidak mudah berkembang biak dan menyerang manusia, kemudian memerangi penyakit bersama-sama dengan memanggil petugas kesehatan apabila terjadi wabah penyakit misalnya terjadinya wabah penyakit demam berdarah. Selain itu partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga kesehatan yang ada di lingkungannya yaitu dengan mengadakan apotik hidup, dimana masyarakat dapat menanam tanaman obat di pekarangan rumahnya masing-masing yang mana khasiat dari tanaman obat tersebut dapat dimanfaatkan oleh diri kita sendiri atau orang lain yang membutuhkannya.

Partisipasi masyarakat lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan pelaksanaan dari salah satu komponen dari sanitasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap keluarga untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Pengelolaan sampah disini dapat dilakukan dari hal yang mudah seperti pengadaan tempat sampah yang baik di setiap rumah tangga dan ditempat-tempat lainnya disekitar lingkungan kita. Tempat sampah yang baik adalah tempat sampah yang telah dibedakan jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik, serta tertutup dengan rapat



agar tidak diacak-acak oleh binatang liar. Dengan membedakan jenis sampah yang kita buang maka akan membantu dalam proses pemilahan sampah karena dengan pemilahan tersebut sampah yang terbuang akan dengan mudah untuk dimanfaatkan kembali. Seperti sampah organik salah satu contohnya, sampah organik biasanya sampah berupa sisa makanan, sampah dapur, daun-daun, dapat diolah menjadi kompos dan dapat dimanfaatkan untuk memupuk tanaman.

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan salah satu langkah yang strategis dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang sehat diharapkan dapat menciptakan masyarakat sehat pula, masyarakat yang mandiri dan berkemampuan karena jiwa dan badan yang sehat sehingga akan memberikan semangat tersendiri serta fokus dalam bekerja.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Sebelum memaknai konsep mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka terlebih dahulu dijelaskan apa sesungguhnya konsep pengelolaan sampah yang dimaksud. Pengelolaan sampah menurut Wikipedia bahasa Indonesia (diunduh tanggal 3 Agustus 2011) sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dari pemahaman tersebut, maka sampah merupakan bahan-bahan yang merupakan sisa dari rumah tangga, pabrik, perumahan, dan lain-lain yang yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi.

Sementara menurut pemikiran Soma (2010:7) dari perspektif kesehatan lingkungan, sampah adalah "sebagian dari benda yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang sedemikian rupa sehingga mengganggu kelangsungan hidup." Jadi pemahaman mengenai sampah tersebut menunjukkan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak bermanfaat lagi, dibuang pemiliknya atau pemakai semula.

Sampah bervariasi bentuk atau jenisnya. Menurut Radyastuti (dalam Buletin Adipura:2003), sampah terdiri dari, pertama, sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga yang terdiri dari sampah organik yang mudah membusuk, yang sebagian besar adalah sisa makanan, potongan hewan, sayuran, dan lain-lain; Sampah kering,

yaitu sampah yang terdiri dari logam seperti besi tua, kaleng bekas, dan sampah kering yang non logam seperti, kertas, kayu, kaca, keramik, batubatuan dan sisa kain; Sampah lembut, misalnya sampah debu yang berasal dari penyapuan lantai rumah, gedung, penggergajian kayu dan abu yang berasal dari sisa pembakaran kayu, sampah dan rokok; dan sampah besar atau sampah yang terdiri dari buangan rumah tangga yang besar seperti: meja, kursi, kulkas, televisi, radio, dan peralatan dapur. Kedua, sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan komersial seperti pasar, pertokoan, rumah makan, tempat hiburan, penginapan, bengkel, kios dan lain-lain. Demikian juga dari institusi seperti perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah dan tempat-tempat non komersial lainnya. Ketiga, sampah bangunan adalah sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan termasuk pemugaran dan pembongkaran suatu bangunan, seperti semen, kayu, batu bata, genting dan sebagainya. Keempat, sampah fasilitas umum adalah sampah yang berasal dari pembersihan dan penyapuan jalan trotoar, taman, lapangan, tempat rekreasi dan fasilitas umum lainnya. Contohnya, daun, ranting, kertas pembungkus, plastik, rokok, debu dan sebagainya.

Batasan dan pengelompokan jenis-jenis sampah di atas menunjukkan bahwa umumnya segala aktivitas sehari-hari manusia akan menghasilkan sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap hari ini apabila dibiarkan begitu saja tanpa pengolahan, tentunya akan mencemari dan merusak lingkungan serta menurunkan derajat kesehatan masyarakat karena jenis dan karakteristik sampah mengandung unsur atau molekul kimia berbahaya serta mikro organisme patogen. Selain itu dari sisi keindahan dan kenyamanan hidup dan pariwisata akan dapat merusak estetika dan mengotori bahkan mencemari obyek wisata.

Selain memiliki implikasi negatif, di sisi lain sampah juga memiliki manfaat lain yang berguna bagi masyarakat. Berdasarkan dampak positif dan negatif tersebut maka sampah tersebut perlu dikelola secara baik, agar dapat dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan suatu keharusan untuk dilakukan, apalagi kalau persoalan sampah itu ada di kota-kota besar.

Menurut Sehati (2010:240) bahwa pengelolaan sampah meliputi: "Pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir." Itu berarti bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu mulai dari pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan, pengolahan dan pembuangan akhir. Dengan perkataan lain, pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Oleh karena itu, beberapa syarat pengelolaan sampah diperlukan, seperti (1). Tata ruang kota harus didesain sedemikian teratur, sehingga pengelolaan berbagai aktivitas perkotaan menjadi efisien dan efektif; (2) perlunya law enforcement, sehingga perilaku masyarakat menjadi partisipatif dan kolaboratif; (3) kesadaran masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan tingkat pendidikan dan kesejahteraannya sehingga mampu ikut menerapkan sistem pengelolaan sampah secara baik. (Miller; dalam Soma: 2010).

Persyaratan di atas setidaknya menunjukkan bahwa untuk menangani pengelolaan sampah, keterlibatan berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan selain pemerintah itu sendiri. Setiap elemen, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus berpartisipasi dan bekerjasama untuk menangani permasalahan sampah yang ada, dengan mempertimbangkan keterbatasan biaya, pendidikan, teknologi, dan keterbatasan perilaku masyarakat.

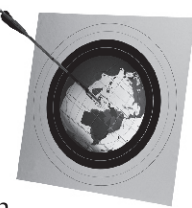
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau yang punya otoritas dan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Selain itu, pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Dengan demikian, pengelolaan sampah secara garis besar merupakan sebuah proses yang diperlukan dengan dua tujuan yaitu: (1) mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan (2) mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Jadi, sesungguhnya muara dari tindakan pengelolaan sampah adalah untuk menciptakan sesuatu hal yang bernilai positif untuk kebaikan bersama

dan lingkungan serta bagi mereka yang memanfaatkannya.

Dewasa ini mempertimbangkan arti penting pengelolaan sampah dan juga kebermaknaan berbagai aktor dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses pembangunan di bidang lingkungan, kebersihan dan keindahan di suatu tempat, khususnya dalam penanganan sampah di kota-kota besar, kedudukan masyarakat dalam proses tersebut menjadi hal yang penting guna keberhasilannya. Masyarakat, yang dalam konteks masalah sampah, merupakan sumber pencipta sampah, dalam proses pengelolaan sampah juga memiliki kedudukan yang penting untuk menangani hal tersebut. Karena diketahui bahwa masalah sampah awalnya merupakan suatu masalah yang bersifat privat atau di lingkungan pribadi. Maka itu, belakangan ini terlihat bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sampah guna menangani permasalahan sampah yang lebih luas di kota besar, mulai diperankan secara aktif bahkan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan perkataan lain, masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan sampah untuk mengatasi masalah persampahan dan/atau dampak yang ditimbulkan oleh sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Partisipasi masyarakat yang sebelumnya telah dimaknai sebagai kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, dalam konteks pengelolaan sampah pun dimaknai demikian. Artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berarti bahwa masyarakat bersedia secara sadar dan tanpa paksaan untuk ikut serta mengatasi atau menangani permasalahan sampah.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mengingat masalah sampah bersumber dari masyarakat itu sendiri. Karenanya kesediaan secara sadar dari pihak masyarakat untuk menangani persoalan tersebut, boleh dikatakan sebagai suatu keharusan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah disebabkan karena arti pentingnya konsep partisipasi itu sendiri, yakni bahwa masyarakat berpartisipasi karena masyarakatlah yang tahu sepenuhnya tentang permasalahan sampah tersebut dan masyarakat memahami kondisi lingkungannya. Apalagi dilihat dari sisi tujuan dilakukan pengelolaan sampah itu sendiri, bahwa untuk menciptakan sesuatu hal



yang bernilai positif bagi masyarakat dan untuk kebaikan bersama dan lingkungan, juga bagi mereka yang memanfaatkannya, maka kedudukan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi suatu yang penting untuk diperhatikan.

Partisipasi masyarakat menurut kamus besar Bahasa Indonesia, partisipasi mempunyai makna peran serta atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Sedangkan definisi konseptual dari Keith Davis dalam Huraerah (2008: 95) adalah "*Participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situation that encourages them to contribute to group goals and share responsibility for them*" (Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya).

Berdasarkan pengertian di atas, partisipasi bukan hanya sekadar mengambil bagian atau pengikutsertaan saja tetapi lebih dari itu. Dalam pengertian tersebut terkandung tiga gagasan pokok, yaitu *mental and emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberikan sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab).

Selanjutnya bahwa makna partisipasi masyarakat dapat dilihat dari perspektif semu dan dapat dilihat dari perspektif murni. Partisipasi semu bermakna bahwa masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan bahkan dimobilisasi untuk melaksanakan pembangunan. Sementara partisipasi masyarakat murni adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang digerakkan dan diinisiatif oleh masyarakat itu sendiri karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi mereka dalam pembangunan untuk kepentingan mereka sendiri.

4. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus mengikutsertakan seluruh komponen yang berada di dalam masyarakat itu sendiri, dan tidak terkecuali dengan perempuan. Salah satu dari tujuh aspek dari strategi pembangunan adalah pandangan tentang peranan wanita. Di mana pada masa

pembangunan sekarang ini peranan perempuan mulai diakui keberadaannya, apalagi dengan ada paradigma pengarusutamaan gender dalam pembangunan (*gender mainstream*).

Pada masa lalu keberadaan perempuan hanya dipandang sebagai "warga negara kelas dua", di mana suaranya kerap kali tidak pernah didengar sama sekali sehingga tidak ada keterwakilan suara apa yang diinginkan mereka. Peranan yang mereka kadang kala hanya dipandang sebelah mata, hanya karena yang dilakukannya melingkupi sektor privat saja atau sekitar rumah, yaitu mengurus rumah tangga, memasak, mengurus suami, dan membesarkan anak-anaknya. Pandangan tradisional seperti itu hampir sama di setiap daerah di Indonesia bahkan di negara lain. Perempuan hanya dianggap sebagai kaum lemah, kaum yang dianggap sebagai pelengkap saja yang tidak mempunyai akses yang sama dengan kaum laki-laki dalam berkesempatan berusaha dan pembangunan. Hal itu menyebabkan terpinggirnya perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam akses politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, terjadilah perubahan mengenai stigma tersebut. Perubahan-perubahan yang dilakukan tidak hanya oleh negara tetapi oleh perempuan itu sendiri. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu dengan berusaha menghapus perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dalam pembangunan. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan perempuan untuk mengubah nasib dirinya, yaitu diantaranya dengan melalui gerakan-gerakan emansipasi yang dipelopori oleh kaum perempuan sehingga berdampak pada makin terbukanya akses yang dapat dinikmati oleh kaum perempuan di semua bidang kehidupan. Pada masa sekarang ini apa yang dapat dilakukan oleh kaum laki-laki dapat pula dilakukan oleh kaum perempuan. Perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal itu terwujud dengan diberikannya kesempatan dan kedudukan yang sama untuk turut serta berperan aktif dalam pembangunan.

Keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan hak yang dimiliki oleh kaum perempuan sebagai

perwujudan demokrasi dalam bernegara. Perempuan merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kemampuan yang dapat diandalkan. Mereka dapat berkiprah di segala bidang kehidupan dengan daya upayanya sendiri tanpa harus meminta belas kasihan dari kaum laki-laki. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melibatkan perempuan dalam pembangunan nasional maupun di daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, termasuk dalam konteks penelitian ini adalah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Bagaimana melihat tahapan atau proses keterlibatan perempuan dalam pembangunan, termasuk dalam pengelolaan sampah, berikut akan diuraikan konsep dan teori mengenai tahapan partisipasi.

5. Tahap-Tahap Partisipasi

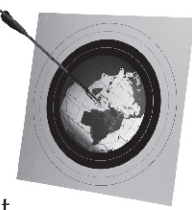
Dalam prosesnya partisipasi tersebut yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan oleh Taliziduhu Ndraha bahwa partisipasi terbagi menjadi beberapa bentuk tahapan yaitu terdiri dari:

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan;
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; dan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gagasan di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dimulai dari ketika mereka melakukan kontak dengan pihak lain untuk suatu tujuan tertentu dalam melakukan pembangunan, ikut merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi pembangunan.

Pemikiran yang lain dikemukakan oleh Mardikanto (2001) bahwa tahapan partisipasi diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukannya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.
2. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan
Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahapan perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target. Perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, oleh karena masyarakat sendirilah yang akan menanggung kehidupan mereka sendiri atas pilihan akhir yang mereka putuskan.
3. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang



sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.

4. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

5. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Pemikiran Mardikanto (2001) di atas mirip dengan yang digagas oleh Ndraha, hanya ada penambahan satu tahapan, yaitu bahwa masyarakat pun dapat berpartisipasi pada tahap memanfaatkan hasil kegiatan, selain terlibat dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan.

6. Tingkatan dan Model Partisipasi Masyarakat
Konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemaknaannya dapat ditinjau dari tingkatan partisipasi. Menurut Hoofsteede dalam Huraerah (2008:101) membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu: (a) partisipasi inisiasi (*inisation participation*) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formasi maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat; (b) Partisipasi legitimasi (*legitimation*

participation) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut; dan (c) Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Dari ketiga tingkatan partisipasi tersebut, partisipasi inisiasi mempunyai kadar yang lebih tinggi dibandingkan partisipasi legitimasi dan eksekusi. Di sini masyarakat tidak hanya sekadar menjadi obyek pembangunan saja, tetapi bisa menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan. Sedangkan apabila masyarakat hanya mengikuti dalam tahapan pembicaraan saja, seperti rembug desa, padahal proyek yang akan dibangun sudah jelas wujudnya, masyarakat hanya berpartisipasi pada tingkat legitimasi saja. Sementara partisipasi eksekusi adalah yang terendah dari semua tingkatan partisipasi tersebut. Masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan proyek, tanpa ikut serta menentukan dan membicarakan proyek tersebut.

Hal itu lebih diperjelas lagi oleh Billah dalam Huraerah (2008: 101) mengenai pemahaman ketiga tahapan partisipasi tersebut. Di mana tahapan inisiasi adalah tahapan ketika gagasan melakukan sesuatu (proyek pembangunan) muncul, baik pada seorang maupun kelompok di dalam komunitas. Gagasan itu kemudian ditularkan (proses *sharing*) ke lingkup yang lebih luas melalui perangkat yang ada di dalam komunitas, misalnya kepala desa, ketua RW/RT, pimpinan informal, para kepala keluarga, atau kelompok informal (majelis taklim, kelompok arisan) maupun kelompok yang lain (PKK, Karang Taruna). Sedangkan tahapan legitimasi adalah tahapan di mana gagasan (untuk melakukan kegiatan pembangunan) memperoleh keabsahan dari komunitas bersangkutan. Keabsahan itu dapat diperoleh melalui perundingan atau musyawarah, baik yang bersifat informal maupun formal. Perundingan informal adalah perundingan/diskusi yang terjadi secara tidak resmi yang biasa di mesjid, surau, warung, atau di tempat orang-orang berkumpul. Sedangkan perundingan formal terjadi secara resmi melalui rapat-rapat RW/RT atau rembug desa di balai desa yang dipimpin oleh kepala desa. Untuk tahapan eksekusi adalah tahapan di mana semua kegiatan untuk mewujudkan proyek (pembangunan) dilaksanakan. Pada umumnya tahapan ini dilakukan melalui suatu proses :

perencanaan, implementasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

Selain para pakar melihat partisipasi dalam tingkatan atau derajatnya sebagaimana dipaparkan di atas, ada juga pakar tertentu yang melihat tingkatan partisipasi masyarakat tersebut dalam berbagai model yang digagas mereka. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Arnstein. Di awal tahun 1969, Arnstein (1969) memperkenalkan gagasan “tangga partisipasi”. Konsep ini pada intinya adalah melihat tingkat keterlibatan masyarakat dari tahapan partisipasi yang paling tinggi seperti kontrol oleh warganegara sampai ke partisipasi semu seperti manipulasi. Gagasan Arnstein ini sangat berguna untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai jenis partisipasi dalam tingkatan proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya model ini dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan besar: non-partisipasi (manipulasi dan terapi), imbal balik (informasi, konsultasi, ajakan) dan kontrol masyarakat (kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan kendali masyarakat). Ketiga tingkatan tersebut diuraikan menjadi delapan tahapan dalam tangga partisipasi Arnstein (dalam Ife & Tesoriero: 2008) yaitu:

1. Non Partisipasi (*non participation*), yang terdiri dari (a) manipulasi atau *manipulation*, dan (b) terapi atau *therapy*. Manipulasi adalah partisipasi yang digerakan oleh orang luar bukan masyarakat sendiri. Sedangkan terapi adalah suatu partisipasi dimana masyarakat dianggap sebagai “penderita” yang harus percaya kepada “dokter” yang mengobatinya.
2. Imbalan/Hadiah (*Tokenism*), yang terdiri dari: (a) informasi atau *informing*, (b) konsultasi atau *consultation*, dan (c)

penentruman atau *placation*. Informasi adalah partisipasi yang dilakukan dengan cara menyampaikan informasi tentang program atau kegiatan hanya satu arah. Sebaliknya untuk konsultasi, informasi terhadap program dan kegiatan pembangunan disampaikan secara dua arah, walaupun masih terbatas. Sedangkan penentruman adalah partisipasi yang dilakukan dengan “melibatkan” para wakil masyarakat dalam program atau kegiatan tersebut, namun keputusan tetap di tangan pemerintah.

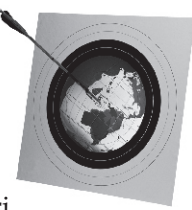
3. Kedaulatan rakyat (*citizen power*), yang terdiri dari: (a) kemitraan atau *partnership*, (b) pendelegasian atau *power delegation*, dan (c) kedaulatan rakyat atau *citizen control*. Seperti namanya, kemitraan adalah proses partisipasi dimana masyarakat dan pemerintah melakukan kerjasama secara sejajar. Sedangkan pendelegasian adalah pemerintah memberikan sebagian kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan. Dan tangga partisipasi yang paling tinggi adalah ketika masyarakat sepenuhnya memiliki kontrol dan mengambil keputusan secara mutlak.

7. Faktor-Faktor Pendukung dan/atau Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Membahas faktor-faktor penghambat dan/atau pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam kesempatan ini, tidak lepas dari pembahasan mengenai konsep partisipasi masyarakat secara umum. Hal itu karena dalam berbagai dimensi pembangunan, konsep partisipasi masyarakat terlihat selalu digunakan dan memiliki arti yang



Gambar 1.
Jenjang Partisipasi Warga Negara
 Sumber : Arnstein (Ife & Tesoriero, 2008:299)



sama, hanya *setting* yang dijadikan latar untuk melihat secara mendalam dan khusus mengenai partisipasi masyarakat sangat bervariasi. Oleh karena itu, dalam menjelaskan dan memetakan faktor-faktor pendukung dan/atau penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, juga mengacu pada pemahaman tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan untuk melihat secara spesifik dalam konteks pengelolaan sampah.

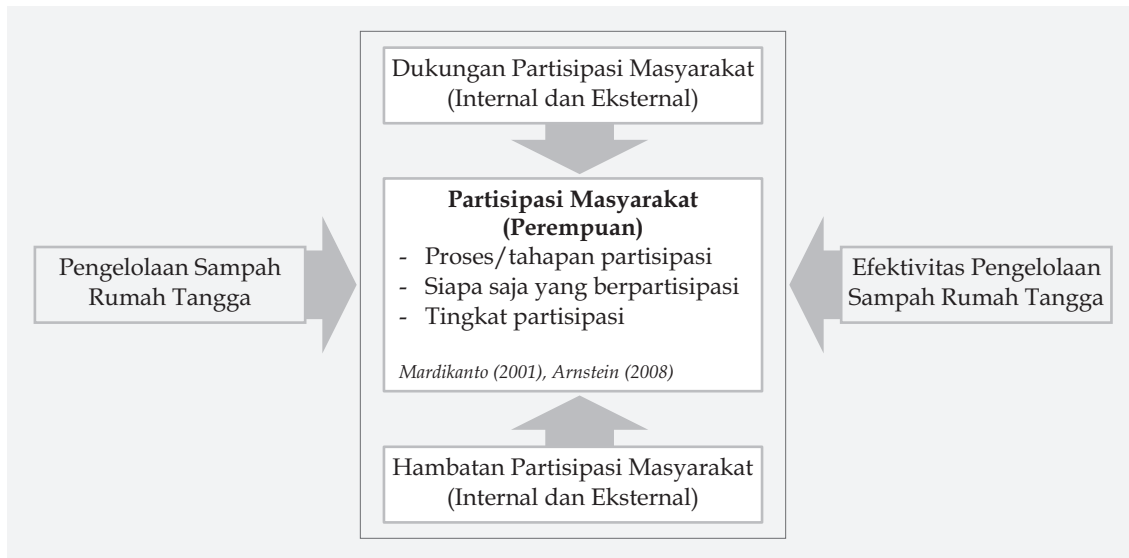
Partisipasi masyarakat sebagaimana diketahui merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Karena diakui bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan itu tidak akan memiliki makna yang mendalam, baik dalam perencanaan sampai pada tahap menikmati hasil pembangunan. Meskipun memiliki arti penting dalam pembangunan, partisipasi masyarakat bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dipraktikkan. Ada faktor-faktor yang dapat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat, jika diperhatikan dengan baik faktor-faktor tersebut. Tetapi di sisi lain, jika tidak diperhatikan dengan baik, maka partisipasi masyarakat itu akan terhambat dalam proses pembangunan, termasuk juga dalam konteks pengelolaan sampah itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan sebuah pendekatan partisipatif, seperti yang diungkapkan oleh Suparjan dan Suyatno (2003) yaitu: "Diantaranya adalah masih adanya anggapan bahwa masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk ikut dalam proses perencanaan sebuah program pembangunan baik secara teknis maupun dana". Hal tersebut menjadi sarana pembenaran bagi para pembuat kebijakan untuk tidak mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan tersebut. Yang pada akhirnya berakibat pada tidak berjalannya proses demokratisasi dalam pembangunan. Faktor lainnya yang sering menghambat implementasi pendekatan partisipatif adalah faktor kapasitas organisasi masyarakat. Pembentukan organisasi yang efektif bagi masyarakat memerlukan waktu, biaya dan pengorganisasian yang cukup lama, di mana hal tersebut dilakukan guna meningkatkan mutu para pelaksana, mutu perencanaan desentralisasi serta program pembangunan masyarakat yang efektif. Apabila hal tersebut diabaikan maka implementasi pendekatan partisipatif justru terkesan menjadi sebuah

persoalan yang kurang efisien baik dilihat dari aspek waktu, biaya maupun tenaga. Oleh karena itu, institusionalisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok atau organisasi yang baik akan memberikan kapasitas yang kuat bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara benar dan berkualitas. Selain itu, faktor yang sering menghambat dalam implementasi pendekatan partisipasi adalah kemungkinan munculnya konflik akibat dari banyaknya tuntutan dan/atau kepentingan dari warga masyarakat. Konflik bukan saja terjadi antara warga masyarakat, melainkan juga karena perbedaan kepentingan lokal dengan kepentingan nasional. Konflik ini, terjadi karena masyarakat di daerah umumnya hanya melihat persoalan-persoalan pada lingkup daerahnya saja, sementara pemerintah pusat dituntut untuk mengakomodasi berbagai tuntutan maupun aspirasi dari tiap-tiap daerah.

Sedangkan untuk faktor-faktor pendukung agar terlaksananya partisipasi masyarakat adalah dengan melihat kondisi-kondisi yang dapat mendorong agar partisipasi tersebut terlaksana, seperti yang dikatakan oleh Ife dan Tesoriero (2008: 310) sebagai berikut: (1). Orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting; (2). Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan; (3). Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai; (4). Orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam partisipasinya; (5). Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan. Artinya bahwa partisipasi masyarakat itu akan tinggi jika masyarakat melihat atau memandang bahwa isu atau aktivitas yang akan dilakukan itu penting untuk kehidupannya, aktivitas tersebut akan membawa perubahan bagi mereka, diakui dan dihargai bentuk partisipasi yang diberikan, mendapat dukungan dan struktur dan proses partisipasi tersebut tidak mengucilkan mereka.

Secara khusus dalam pengelolaan sampah, penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2009) mengenai "Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Perumahan Pondok Indah Pekayon Bekasi" menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendorong partisipasi masyarakat adalah fasilitas yang memadai dari pihak masyarakat dalam hal ini kelompok gerakan peduli lingkungan (GPL), penyuluhan intens dari GPL kepada warga masyarakat, monitoring dari kader dan fasilitator, dan keterlibatan semua stakeholders, baik warga, pemerintah, maupun mitra kerja



Gambar 2.
Model Berpikir Penelitian

kelompok GPL. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah faktor waktu, gaya hidup atau kebiasaan masyarakat, fasilitas yang belum memadai. Jadi, berpijak pada berbagai ide di atas dapat diketahui bahwa ada variasi faktor yang dianggap sebagai penghambat dan/atau pendorong keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, tetapi jika diperhatikan secara serius maka faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi, yakni dimensi internal masyarakat dan dimensi eksternal masyarakat itu sendiri.

8. Model Berpikir

Berdasarkan tinjauan konsep dan teori yang dijelaskan sebelumnya maka secara sederhana rangkaian penjelasan tersebut dapat diringkas ke dalam model berpikir yang ada pada Gambar 2.

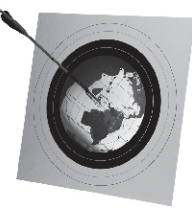
C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mengungkapkan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian adalah hal penting yang perlu dilakukan oleh peneliti. Untuk mengungkapkan tujuan penelitian ini, yakni pertama, mengetahui dan menjelaskan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dan kedua, mengetahui dan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan

Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, maka akan digunakan metode studi kasus (*case study*) dalam pendekatan kualitatif.

Pilihan menggunakan studi kasus dalam pendekatan kualitatif karena masalah yang diteliti bersifat spesifik atau khusus dan obyek tertentu, yaitu mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Pemikiran tersebut mengacu pada pengertian yang dikemukakan oleh Yin (2003) dalam Chairi (2007) bahwa: *Case study research* adalah penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu dalam konteks kehidupan nyata (*real life*) bersifat temporer dan spesifik. Penelitian ini melibatkan kontak langsung dengan obyek penelitian, bersifat detail dan menyeluruh (*holistic*). Dalam *case study* peneliti merupakan instrumen riset utama. Sedangkan untuk keperluan analisis, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang melibatkan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selain itu, penggunaan metode studi kasus dalam pendekatan kualitatif guna mengeksplorasi, mengumpulkan data dan menganalisis hal-hal menyangkut partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, maka yang menjadi unit analisisnya adalah masyarakat yang ada di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung khususnya kaum perempuan. Maka itu, langkah pertama yang dilakukan adalah



dengan melakukan penelaahan terhadap beberapa informan penting, yang menurut peneliti merupakan pihak yang berkepentingan dan berkompeten mengetahui dan memahami persoalan terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Tindakan ini dilakukan seraya melakukan pengumpulan data tentang tindakan-tindakan mereka, kepentingan mereka, persepsi, perilaku pengalaman, pikiran dalam hubungannya dengan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Sehingga analisis yang dilakukan sangat terkait dengan kumpulan dan analisis terhadap data dan informasi dari wawancara dan observasi secara langsung serta terlibat dalam berbagai perilaku atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, ataupun melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki pengalaman, pengetahuan dan informasi terkait tujuan penelitian ini.

Dalam konteks yang demikian itu, pendekatan kualitatif mengacu pada paradigma fenomenologis yang tertarik pada pemahaman mengenai perilaku manusia seperti yang dipahami dan dituturkan oleh pelaku atau individu itu sendiri relevansinya dengan fenomena sosial yang dialami dalam aktivitas berpartisipasi. Oleh karena itu, sangat disadari peneliti bahwa dalam konteks ini keperluan akan metode memahami, yaitu suatu proses mengubah sesuatu yang diminati atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, menurut Denzin (2005), Cresswell (2003), Riawanti, (2010), merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan oleh peneliti dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode memahami ini tentu saja berdasarkan pengalaman atau data empiris, pengetahuan konseptual dan teoritis serta mental peneliti. Kemudian hal tersebut diinterpretasikan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan kata-kata atau bahasa yang dimengerti, obyektif dan logis.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka peneliti dalam hal ini harus terjun langsung ke lapangan tetapi harus bersikap dan membangun hubungan antar-pribadi yang dilandasi pemahaman empati dan saling menghargai, terutama ketika melakukan wawancara. Atas dasar itu, maka peneliti harus berusaha mengembangkan sikap terbuka terhadap keadaan yang sebenarnya selama memasuki

lokasi penelitian.

1. Instrumen Penelitian & Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2004: 5) bahwa: hanya "manusia sebagai alat" sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya 'manusia sebagai instrumen' pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti menyadarinya serta dapat mengatasinya.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian dengan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, hanya penelitalah yang mampu mengungkapkan, menginterpretasi dan menganalisis data secara benar dan tepat. Situasi tersebut sangat tergantung atau ditentukan dari visi dan presisi peneliti. "Visi menggambarkan kemampuan peneliti untuk menjalin fenomena sosial tertentu. Sedangkan presisi yaitu kemampuan untuk mengungkapkan realitas sosial secara obyektif, otentik, tepat dan tidak menyimpang atau *unbias*" (Tjokrowinoto, 2001). Dengan demikian, sekali lagi dipertegas bahwa instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, tetapi diakui bahwa dalam praktiknya peneliti tetap saja menggunakan alat atau instrumen lain sebagai pedoman dan pendukung upaya menggali data seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, dan kamera foto.

Data dalam penelitian ini akan dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut karena penelitian ini menggunakan studi kasus dalam pendekatan kualitatif maka beberapa teknik pengumpulan data yang merupakan ciri dari pendekatan kualitatif akan digunakan. Teknik-teknik yang dipilih yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap berbagai pihak yang dianggap sebagai *key informan*, sehingga teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini kegunaannya sangat bermanfaat, demikian juga pengamatan langsung dan studi dokumentasi atau pustaka.

Untuk teknik wawancara, maka wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bersifat individual dan mendalam kepada informan

Tabel 1. Informan kunci Penelitian

Informan Kunci
1. Ibu-Ibu PKK RW.02 Kel.Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung.
2. Ketua RW.02 Kel.Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung..
3. Ketua RT 01 s.d. RT.08 Kel.Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung
4. Beberapa Tokoh Masyarakat yang berada di lingkungan RW.02 Kel.Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung.
5. Petugas Kebersihan di lingkungan RW.02 Kel.Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung.

yang dipilih dengan sengaja untuk memperoleh informasi awal yang representatif terkait tujuan penelitian. *Key informan* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang tercantum pada Tabel 1.

Selain melalui wawancara, penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, menggunakan juga teknik pengamatan atau observasi langsung. Teknik ini disamping menghindari terjadinya reaktivitas atau halo effect, yaitu pengaruh dari keberadaan peneliti terhadap latar atau orang-orang yang diteliti ketika diwawancarai, juga berfungsi untuk meneropong secara lebih dekat hal-hal yang tidak terungkap dari hasil wawancara di atas yang tergambar dari sikap, tindakan, kebiasaan dan lain-lain. Kesemuanya itu dipotret langsung di lokasi penelitian (Bungin, 2006).

Metode pengumpulan data lain adalah studi dokumentasi atau pustaka. Cara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Penggunaan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, menurut Denzin, et.al. (2005) dan Cresswell (2003) disebut dengan istilah teknik/metode triangulasi yaitu dengan cara melakukan *cross-check* terhadap penggunaan berbagai cara pengumpulan fakta dan data, dengan tujuan untuk meningkatkan kesahihan (validitas) dan tingkat keterandalan (reliabilitas) terhadap data kualitatif yang diinterpretasi dan dimaknai, sehingga pada akhirnya peneliti dapat terhindar dari penarikan kesimpulan yang tidak tepat.

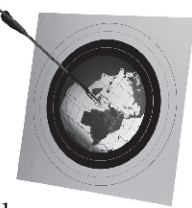
2. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data

Sebagai konsekuensi menggunakan metode studi kasus dalam pendekatan kualitatif, maka peneliti perlu bersikap terbuka dalam menganalisis data. Peneliti harus berusaha bersikap terbuka terhadap realitas subyek yang diteliti. Oleh karena itu, analisis dimulai dengan suatu sikap mendengarkan subyek penelitian

secara terbuka tanpa “diarahkan” oleh asumsi-asumsi peneliti sendiri atau teori-teori yang sudah ada untuk menghindari ancaman validitas interpretasi dan teori.

Dalam penelitian kualitatif, data dan informasi terkait dengan tujuan penelitian akan dianalisis selama data dan informasi itu dikumpulkan. Dan proses pengumpulan dan analisis itu terus berlangsung sampai data dianggap “tuntas” atau tidak ada lagi data baru yang perlu dicari (*ongoing analysis*). Cara ini diambil oleh peneliti karena peneliti menyadari cara ini sangat berguna dalam proses penelitian selanjutnya, agar semakin terarah dan semakin mendalam. Sekaligus berusaha mencari hal-hal dan/atau faktor-faktor yang sesuai dan memiliki hubungan dengan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung terjadi. Operasionalisasinya, peneliti melakukan dengan membuat memo, yaitu catatan peneliti di samping catatan berupa data, yang berisi pikiran-pikiran peneliti dari membaca data yang terkumpul, melalui wawancara dan pengamatan, dari hari ke hari selama peneliti berada di lapangan. Yang dimaksud dengan pikiran peneliti di sini adalah ide, bisa berupa konsep atau teori yang telah diketahui dari khsanah pustaka ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian atau dibuat peneliti sendiri ketika membaca data yang ditemukan.

Proses analisis selanjutnya adalah proses analisis yang dalam definisi disebut sebagai mengatur dan mengorganisasikan data. Data yang diambil dalam pencatatan, rekaman dan pengamatan langsung terhadap kata dan tindakan, hendaknya harus ditelaah. Hal itu dilakukan karena data bukan sekadar yang terdengar dan terlihat, melainkan lebih dari itu yaitu makna yang terdapat dibalik kata dan tindakan itu. Itulah yang harus diorganisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu sehingga menghasilkan tema yang dapat menjawab tujuan penelitian yang dimaksud. Pemahaman



ini akan dilakukan dengan berlandaskan pada kerangka konsep dan teori dari subyek yang diteliti (pengetahuan emik) dan berlandaskan juga pada kerangka konsep dan teori dari peneliti sendiri (pengetahuan etik). Hal ini dilakukan dalam rangka membandingkan, menghubungkan-hubungkan dan menganalisis segala data yang ditemukan dalam kerangka membuat kesimpulan pada akhirnya.

Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap data yang ada. Dalam proses ini metode memahami seperti yang dikatakan oleh Denzin (2005), Cresswell (2003), dan Riawanti, (2010) sebelumnya, menjadi hal yang amat penting supaya data yang diperoleh tersebut dapat dimengerti, obyektif dan logis. Ketiga proses analisis tersebut di atas, harus terjadi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16), yaitu: "Dalam kegiatan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap berbagai hipotesa yang disusun secara kualitatif".

Pada tahap reduksi data yang merupakan alur penting pertama dari kegiatan analisis, kegiatan yang dilakukan adalah berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan, kemudian dikelompok-kelompokkan menurut kategorinya. Data yang telah dikategorikan kemudian diklasifikasikan untuk diinterpretasikan guna memberi makna kepada usaha pengambilan kesimpulan penelitian setelah melalui verifikasi. Pada reduksi data sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman (1992: 17), berlangsung secara terus menerus. Dengan kata lain reduksi data ini dianggap merupakan suatu proses transformasi yang berlanjut hingga laporan akhir penelitian tersusun secara lengkap. Karena itu reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis data yang lainnya, melainkan merupakan bagian dari analisis data secara keseluruhannya. Oleh sebab itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik setelah melalui verifikasi.

Ketika proses reduksi data inilah, dilakukannya triangulasi sebagaimana

diisyaratkan dalam metode kualitatif yaitu berupa data yang diperoleh dari teknik tertentu dicek dengan teknik yang lain dan/atau satu pihak dicek kebenarannya melalui pihak lain atau sumber lain. Tujuannya adalah membandingkan data atau keterangan yang ada dengan data yang diperoleh dari pihak lain sehingga ada jaminan tingkat validitas dan realibilitas data guna mencegah adanya bahaya subyektifitas. Oleh karena itu, keabsahan data pendataan dalam hal ini akan dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber.

Pada tahap penyajian data yang merupakan alur penting kedua dari kegiatan analisis data, kegiatan yang dilakukan adalah menyajikan hasil reduksi data guna memahami hal yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah pemahaman terhadap partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Prinsip yang terkandung di dalam penyajian data ini adalah menyajikan data sebaik mungkin, guna menghasilkan analisis data kualitatif yang valid. Ketika dilakukan penarikan kesimpulan setelah diverifikasi yang merupakan alur penting ketiga dari kegiatan analisis data, kegiatan yang dilakukan adalah berupa penarikan kesimpulan setelah diverifikasi dari hasil reduksi data dan penyajian data di atas. Sebenarnya, sejak permulaan pengumpulan data telah dilakukan pencarian arti dan makna yang mendalam tentang keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat dari data atau keterangan yang ada dari *key informan*. Dengan demikian, perlu pemahaman dan interpretasi yang baik oleh peneliti sedari awal penelitian itu dilakukan. Oleh karenanya, kecermatan dan refleksi diri sangat diperlukan guna pemahaman dan pemaknaan data yang ada, yang diperoleh dari *key informan* dan pengamatan di lapangan. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi serta studi dokumentasi, maka hasil analisis penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Partisipasi Warga (Perempuan) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Keterlibatan warga (perempuan) RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler dalam pengelolaan sampah bermula dari diterimanya undangan untuk ikut serta dalam Program Bandung *Green and Clean* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pada saat itu diputuskan untuk ikut serta dan mendaftar dalam kegiatan tersebut.

Bandung *Green and Clean* (BGC) merupakan program yang digelar oleh Pemkot Bandung pada tahun 2009. Salah satu kegiatan dari BGC ini adalah kompetisi lingkungan tingkat RW berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Tidak hanya itu saja program tersebut juga memberikan pelatihan-pelatihan yang akan menunjang program tersebut, seperti pelatihan fasilitator. Kegiatan yang diikuti kali pertama oleh RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler, yang diwakili oleh Pak Karman dan Pak aceng, yang mempunyai tugas dari hasil pelatihan tersebut adalah menyampaikan atau memberikan pengarahan kepada warga mengenai pemilahan dan pengomposan sampah. Kemudian pada tahun 2010 pelatihan serupa diikuti lagi oleh Ibu Suherman dan Ibu Radikin yang mempunyai tugas yang sama.

Kemudian pada tahun 2011 BGC mengadakan pelatihan Keluarga Sahabat Sampah yaitu mengenai produk daur ulang, yang diikuti oleh 10 kecamatan dimana RW 02 salah satu di antaranya. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh Ibu Suherman dan Ibu Radikin. Pelatihan ini mengenai cara-cara pembuatan produk-produk dari hasil daur ulang. Dari pelatihan tersebut RW 02 memperoleh 1 unit mesin jahit dengan catatan bahwa RW 02 mau melaksanakan program tersebut dengan dimonitor oleh BGC. Dan jika dalam dua bulan tidak menghasilkan produk dari hasil daur ulang tersebut maka mesin jahit tersebut akan ditarik kembali. Oleh karena hal tersebutlah maka ibu-ibu PKK termotivasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk dari hasil pemilahan sampah dengan mengajak warga khususnya ibu-ibu untuk melaksanakannya. Setelah tiga bulan, kemudian dicek ternyata hanya RW 02 yang berhasil melakukan program tersebut. Dan hanya RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler saja yang berhasil melakukannya dan lainnya tidak. Dari hasil kegiatan itu RW 02 memperoleh juara dua dalam Program BGC dalam katagori Keluarga Sahabat Sampah (KSS).

2. Tahap-Tahap Partisipasi

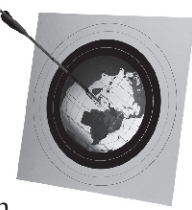
2.1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan

Seperti diketahui pada umumnya program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan forum-forum terbuka agar masyarakat bersedia untuk berpartisipasi secara langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan yang ada di wilayahnya.

Begitu pula dalam program pengelolaan sampah yang ada di RW 02. Meskipun program tersebut berasal dari pemerintah Kota Bandung, Program *Bandung Green and Clean* (BGC), tetapi warga RW 02 tidak merta melaksanakan program itu ketika mereka mendapat undangan agar warga di RW 02 turut bergabung dalamnya. Tetapi diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh warga untuk melaksanakan program tersebut. Melalui forum musyawarah warga, program BGC itu oleh ibu-ibu PKK RW.02 yang disampaikan oleh Ibu Ketua PKK, mengusulkan supaya warga RW 02 turut serta dalam program pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di lingkungannya. Hal itu dilakukan karena Ibu-ibu PKK RW 02, dalam hal ini Ibu Suherman dan Ibu Radikin, yang telah mengikuti program pelatihan pengelolaan sampah khususnya dalam pembuatan produk-produk dari hasil pemilahan sampah melihat begitu besar manfaat yang akan diterima oleh warga apabila mau mengelola sampah rumah tangganya secara mandiri.

Dengan melihat manfaat yang akan diterima dan dampak positif yang akan ditimbulkannya, maka pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 dalam pertemuan warga yang dihadiri oleh Ketua RW beserta tiga orang stafnya, Ketua RT mulai dari RT 01 sampai RT 09, enam orang kader PKK, dan enam orang tokoh agama dan masyarakat yang ada di lingkungan RW 02 akhirnya menyetujui dan bermufakat untuk turut serta dalam menajalankan program pengelolaan sampah secara mandiri. Begitu pula ketika program ini dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya. Dengan berdasarkan keputusan rapat bersama pada tanggal 20 Mei 2011, warga RW 02 bersama Bandung *Green Clean* menyetujui serta mendukung kembali program tersebut.

Dapat diperhatikan bahwa partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pengambilan



keputusan di atas sangatlah penting. Karena dengan adanya keputusan bersama dengan melibatkan unsur masyarakat di dalamnya membuat masyarakat mengetahui program-program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Berdasarkan keputusan bersama pulalah masyarakat mempunyai kewajiban untuk turut serta mendukung apa yang telah menjadi ketetapan di dalam melaksanakan pembangunan.

Selanjutnya, melalui data pengamatan penulis ternyata tidak hanya mengenai pengelolaan sampah saja yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tetapi untuk hal lain juga, seperti kerja bakti, perbaikan infrastruktur di lingkungan di RW 02, Keluarga Berencana, serta mengatasi masalah sosial lainnya yang ada di lingkungan RW 02. Semua diputuskan bersama-sama dalam forum musyawarah warga. Musyawarah warga atau yang biasanya mereka sebut pertemuan RW, dalam melaksanakan kegiatannya dilakukan pada tanggal 7 setiap bulannya. Di dalam forum tersebutlah masyarakat dapat menyampaikan masalah-masalah yang ada di lingkungannya dan di dalam forum itu pulalah masalah tersebut dibahas dan diputuskan bersama bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Melalui forum pertemuan itu pulalah biasanya Ketua RW 02 beserta para Ketua RT dan jajarannya menyampaikan ke warganya mengenai program-program kegiatan yang akan dilakukan di lingkungannya beserta pengumuman lainnya yang harus disampaikan yang berkenaan dengan warga.

2.2. Tahap partisipasi Dalam Perencanaan kegiatan

Tahapan partisipasi dalam perencanaan kegiatan dalam pengelolaan sampah ini dapat dilihat ketika program ini akan disosialisasikan kepada warga, dimana para pengurus RT atau lebih tepatnya para kader PKK RT menyampaikan hasil pertemuan RW mengenai program pengelolaan sampah kepada warga lebih terperinci. Pada pertemuan RT tersebut kader PKK menyampaikan maksud dan tujuan dari program tersebut serta manfaat yang akan diterima oleh masyarakat apabila turut serta melaksanakannya.

Pada pertemuan itu pulalah para kader PKK menjelaskan bagaimana cara pemilahan sampah yang baik dan benar, apa saja yang harus disiapkan dalam pelaksanaannya. Dan tidak lupa para kader juga menanyakan kesanggupan

warga apakah bersedia untuk turut serta dalam program pemilahan sampah atau tidak. Sepanjang yang diketahui oleh para kader bahwa warga tidak berkeberatan untuk ikut serta dalam program pemilahan sampah tersebut. Hal itu pun terlihat ketika penulis menanyakan kepada salah satu kader PKK RT bagaimana animo atau respon warga terhadap program pemilahan sampah ini, apakah mendukung atau tidak. Salah satunya Ibu PKK RT 04 menjawab :

Pada umumnya warga mendukung program pengolahan sampah tersebut, tapi harus disediakan tempat khusus yang gratis.

Hal yang sama dijawab oleh Ibu Ketua PKK RW 02:

Secara umum responnya baik, tapi tidak semua orang merespon program ini dengan baik. Ada satu dua orang yang tidak begitu peduli terhadap program tersebut, yang salah satu di antaranya penduduk musiman...

Selain menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika melakukan pemilahan sampah, para Kader PKK juga mengajak keikutsertaan warga khususnya ibu-ibu untuk turut serta pula dalam pengelolaan sampah selanjutnya. Bertempat di Balai RW 02 yang direncanakan menjadi tempat pengelolaan sampah selanjutnya, ibu-ibu kader PKK merencanakan siapa yang akan menerima/menampung sampah yang telah dipilah dari warga, siapa yang akan membersihkan dan mempoli, siapa yang akan membuat model produk dan menjahitnya. Model-model produk yang biasanya dibuat dari sampah daur ulang yaitu seperti tas belanja, tas wanita, dompet, tempat pensil dan lain-lain. Dan juga merencanakan bagaimana produk tersebut dipasarkan. Semua itu direncanakan bersama dan diputuskan bersama pula melalui pertemuan warga.

2.3. Tahapan partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Tahapan ini merupakan tahapan yang penting, karena pada tahapan ini kita dapat melihat sejauhmana keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program yang telah diputuskan dan direncanakan bersama. Begitu pula partisipasi warga khususnya perempuan yang ada di RW 02 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga yang secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik, sesuai dengan apa telah yang direncanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua PKK RW 02 ketika penulis mempertanyakan bagaimana

partisipasi ibu-ibu dalam mengelola sampah rumah tangganya, yaitu : "Pada saat ini sedikit banyak sudah baik, meskipun dalam proses pemilahan sampah rumah tangga hanya menggunakan kantong plastik. Hanya pada saat ini masih ada ibu-ibu yang kurang peduli lingkungan di luar rumahnya. Jadi harus selalu diingatkan kepada mereka, agar mau menjaga lingkungan di sekitar rumahnya.

Hal itu juga di pertanyakan kepada Kader PKK RT mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di RT-nya masing-masing apakah berjalan dengan baik. Ternyata dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga belum sepenuhnya dilakukan oleh semua ibu-ibu yang ada di setiap RT di RW 02. Sebagian ada yang telah melakukannya tetapi masih ada juga sebagian lainnya yang belum mau melaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Kader PKK RT 05: "Partisipasi ibu-ibu dalam proses pemilahan sampah dapat dikatakan belum berhasil hal itu terlihat dengan masih banyaknya ibu-ibu menyatukan sampah rumah tangganya menjadi satu tidak dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering...." Hal itu dikatakan pula oleh Ibu Kader PKK RT 06: "... hanya kurang dari 20 orang ibu saja yang biasanya ikut serta dalam pertemuan arisan RT dan mereka telah mengetahui program pemilahan sampah dari pertemuan tersebut. Melalui pertemuan itu mereka mengetahui bagaimana dan cara melakukan proses pemilahan sampah. Jadi yang pasti mereka mendukung program tersebut karena ketika diminta untuk mengumpulkan hasil pemilahan sampah yang mereka kumpulkan mereka pasti melakukannya. Tetapi kita tidak mengetahuinya secara pasti proses pemilahan sampah yang dilakukan warga di rumah mereka masing-masing. Tapi yang kita tahu pasti bahwa mereka melakukan pemilahan karena warga menyeter hasil dari pemilahan tersebut, meskipun mereka kadang kala suka lupa juga.

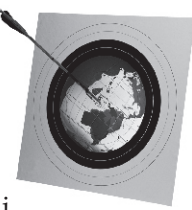
Perlu diketahui bahwa proses pengolahan sampah yang dilakukan warga di rumahnya masing-masing hanya sampai pada pemilahan saja, yaitu memilah antara sampah basah dan sampah kering. Terutama sampah kering berupa plastik kemasan yang akan diolah kembali menjadi suatu produk. Dan untuk proses pengolahan sampah selanjutnya sampai menjadi suatu produk dilakukan di Balai RW. Keikutsertaan perempuan dalam pengelolaan

sampah selanjutnya yang dilaksanakan di Balai RW pun tidak sepenuhnya dilakukan oleh semua perempuan atau ibu-ibu yang ada di RW 02. Meskipun mereka selalu dihimbau atau diundang untuk turut serta melakukan pengolahan sampah kering yang mereka kumpulkan baik melalui Kader PKK di RTnya masing-masing ataupun disampaikan secara langsung oleh perangkat RW.

Walaupun tidak didukung sepenuhnya oleh semua perempuan yang ada di RW 02 para Kader PKK beserta jajarannya tidak putus asa, mereka bertekad untuk tetap melaksanakan program ini. Dengan memaksimalkan kehadiran ibu-ibu yang ada pengelolaan sampah tetap dijalankan. Mereka membagi pekerjaan sesuai dengan keinginannya, ada yang bagian membersihkan kemasan dan mengeringkannya, memotong sesuai dengan pola, menganyam dan menjadikannya jadi satu, tetapi untuk menjahitnya diperlukan seseorang yang memang ahli di bidangnya. Karena untuk menjahit suatu produk, misalnya tas, yang terbuat dari bahan plastik sangat sulit dilakukan oleh orang biasa dan hanya bisa dilakukan oleh orang telah terbiasa atau sudah ahli melakukannya. Tetapi warga RW 02 tidak mengalami kesulitan mendapatkan orang tersebut karena secara kebetulan salah satu warga yang berasal dari RT 07 dapat melakukannya. Tetapi meskipun begitu PKK RW harus tetap membayar jasa beliau berdasarkan produk yang dihasilkan. Misalnya untuk sebuah tas jasa yang harus dibayar sebesar Rp. 15.000,- per buah dan sebuah dompet Rp. 5.000,- perbuah dengan perlengkapan dan asesoris disediakan dari Kader PKK. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua PKK RW 02: "...Terkecuali untuk menjahit diperlukan tenaga yang ahli dalam melakukannya, dimana dibayar sebesar Rp. 15.000,- per buah untuk tas dan sebesar Rp. 5.000,- per buah untuk sebuah dompet dengan perlengkapan dan asesoris diberi oleh pengurus PKK..."

Tidak hanya apa yang telah disebutkan di atas saja tetapi keikutsertaan ibu-ibu dalam menentukan model yang akan dibuat juga sangat berarti. Mereka berembung model apa yang akan dibuat, mereka biasanya melihat katalog-katalog model tas yang ada dan kemudian memutuskan bersama-sama model apa yang akan dibuat. Untuk urusan belanja bahan-bahan perlengkapannya pun dilakukan oleh ibu-ibu.

Mengenai pemasaran dari produk yang telah



jadi, para pengurus PKK tidak hanya melakukannya sendiri tetapi juga menggandeng pihak ketiga dalam melakukannya. Seperti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Rumah Zakat. Pameran tersebut sangat membantu pengurus dalam memasarkan dan menjual hasil produk yang mereka hasilkan. Tetapi tidak hanya itu saja para pengurus juga mengikuti pameran yang lainnya yang biasanya diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Selain usaha yang telah disebutkan di atas, ternyata ada upaya lain dalam memasarkan hasil produk daur ulang ini. Seperti keterangan yang diberikan oleh Ketua RW 02 bahwa sebenarnya telah ada upaya kerjasama dengan produsen salah satu produk dari daur ulang (PT. Unilever Indonesia). Mereka memesan produk-produk daur ulang tersebut dengan berbahan dasar produk kemasan yang mereka keluarkan. Dengan jumlah dan model yang telah mereka tentukan ternyata warga RW 02 belum mampu memenuhinya. Hal tersebut terbentur dengan bahan dasar yang mereka perlukan dalam membuat produk tersebut. Karena tidak selamanya bahan yang diperlukan selalu ada atau terbatas persediaannya.

Usaha lainnya seperti menjual ke pusat pertokoan pun pada saat ini belum dapat dilaksanakan. Hanya apabila ada orang yang datang yang telah mereka kenal yang biasanya meminta atau bersedia untuk dititipi barang tersebut untuk dijual di tempat mereka ibu-ibu PKK RW 02 akan memberikannya.

2.4. Tahap Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Pada tahap ini para pengurus RW tidak membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi hasil kerja dari program pengolahan sampah rumah tangga yang telah dilakukan. Pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan oleh pengurus RW dan para Ketua RT beserta jajarannya. Karena merasa menjadi bagian dari kepanitiaan Program BGC maka secara otomatis mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk memantau berjalannya program ini dan mengevaluasi hasilnya.

Untuk warga sendiri keikutsertaannya dalam memantau program ini dilakukannya secara tidak langsung. Mereka (ibu-ibu) memberikan perhatian atas berjalannya program ini melalui masukan-masukan yang dapat mereka sampaikan kepada para pengurus. Mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan dan

apa yang sebaiknya dilakukan. Melalui pendapat-pendapat tersebut maka para pengurus dapat mengetahui sejauhmana program pengolahan sampah rumah tangga yang ada di lingkungannya apakah telah berjalan dengan baik atau belum. Melalui masukan-masukan itu pula para pengurus RW dan RT mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh warganya dalam melakukan pemilahan sampah dan berusaha bersama-sama pula dalam mengatasinya.

Hal itu terungkap ketika penulis menanyakan bagaimana pemantauan dan evaluasi yang dilakukan para pengurus RW dan RT dalam menjalankan program ini. Dan Ketua PKK menjawabnya sebagai berikut: "Tidak ada tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi dari program pengelolaan sampah ini. Selama ini pemantauan hanya dilakukan oleh para pengurus RW dan RT beserta jajarannya saja. Karena secara otomatis merasa bagian dari kepanitiaan BGC, mereka merasa bertanggung jawab untuk memantau dan memperhatikan sejauhmana program ini dijalankan. Untuk warga sendiri khususnya perempuan atau ibu-ibu tidak terlalu banyak terlibat dalam pemantauan dan evaluasi. Tapi mereka dapat memberikan pendapatnya atau apa yang menjadi keinginan mereka. Karena dari masukan tersebut para pengurus RW dan RT dapat melihat sejauhmana program tersebut telah dijalankan. Dan dari masukan itu pula para pengurus menjadi tahu apa yang menjadi masalah yang ada di warga, dan bersama-sama mengatasi masalah tersebut sesuai keinginan mereka"

Pertanyaan yang sama pula disampaikan oleh penulis kepada salah satu pengurus PKK RT, dalam hal ini dijawab oleh salah satu Kader PKK dari RT 06, yaitu: "Untuk pemantauan tidak dilakukan secara khusus oleh orang tertentu. Tapi biasanya dilakukan oleh pengurus RT yang dalam hal ini dilakukan oleh para kader PKK di RT-nya masing-masing. Itu juga dilakukan tidak secara langsung dengan mengecek kesetiap rumah warga apakah program pemilahan sampah ini telah dilaksanakan dengan baik. Biasanya para kader PKK melakukannya dengan cara tidak langsung, yaitu dengan cara memperhatikan keadaan rumah-rumah warga yang ada di lingkungan di RT-nya masing-masing ketika berjalan berkeliling. Apabila ada warga yang rumahnya belum memiliki tong sampah atau banyak sampah yang berserakan di sekitar rumahnya, biasanya ibu kader PKK akan segera

menegurnya supaya membereskannya dan dianjurkan untuk mempunyai tempat sampah yang memadai.”

Untuk evaluasi juga warga tidak begitu banyak dilibatkan. Biasanya hanya para Ketua RT saja yang menyampaikan perkembangan program pemilahan sampah ini kepada Ketua RW. Baik mengenai masalah yang ada di lingkungan warga dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

2.5. Tahap Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting. Sebab tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan pembangunan mutlak harus dilakukan di setiap lapisan masyarakat, sehingga hasil dari pembangunan tersebut pun dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat pula. Begitu pula yang diinginkan oleh warga RW 02 khususnya para pengurus RW dan RT yang tergabung dalam kepanitian BGC. Mereka sangat mengharapkan manfaat dari program yang mereka jalankan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga yang ada di lingkungan RW 02. Manfaat yang dapat merubah kehidupan dan lingkungan warga menjadi lebih baik.

Keikutsertaan warga dalam menikmati hasil dari program pengelolaan sampah sencara mandiri pada saat ini memang belum dirasakan oleh warga secara langsung orang perorangan. Karena ketika warga menyerahkan hasil pemilahan sampahnya mereka tidak menerima imbalan, mereka menyerahkannya secara sukarela ke balai RW. Walaupun ada, hanya beberapa orang saja itu pun untuk barang yang biasanya dapat dijual kembali ke lapak pengumpul barang bekas. Sedangkan untuk sampah kering yang diolah kembali menjadi produk mereka tidak meminta imbalan.

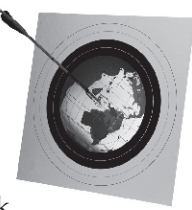
Manfaat yang dirasakan warga pada saat ini baru sebatas manfaat yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat yang dirasakan secara umum yaitu lingkungan RW 02 menjadi lebih bersih dan lebih hijau. Meskipun lingkungan RW 02 merupakan lingkungan yang padat penduduk tetapi sekarang mereka sudah memiliki kepedulian akan kebersihan di lingkungannya, walaupun belum semua warga memiliki kepedulian itu. Jalan-jalan menjadi lebih bersih, rumah warga menjadi lebih hijau karena tanaman yang mereka tanam

dipekarangan atau dalam pot-pot bunga. Dan yang lebih terlihat jelas adalah aliran Sungai Cidurian menjadi bersih dimana warga tidak lagi berani membuang sampah ke dalamnya. Hal itu terlihat ketika penulis berjalan-jalan disekitar Sungai Cidurian dimana sungai cukup bersih dengan spanduk-spanduk yang berada di pinggir aliran sungai yang bertuliskan mengenai besarnya manfaat menjaga kebersihan di lingkungan sendiri. Selain itu penulis juga mempertanyakan kepada Kader PKK RT mengenai sejauhmana manfaat perubahan yang dirasakan oleh warga di lingkungan RW 02 setelah menjalankan program ini. Dan beberapa pendapat dikemukakan oleh beberapa Kader PKK RT, yaitu Kader PKK RT 04 berpendapat: “Ada, kebersihan lingkungan menjadi lebih baik...” Kader PKK RT 06 berpendapat: “Ada perubahan, lingkungan lebih bersih dan tanaman-tanaman ada disepanjang jalan di lingkungan RT 06.”

Kader PKK RT 07 berpendapat: “Ada perubahan meskipun tidak besar, dan yang pasti adanya perubahan pada sikap warga yang makin peduli terhadap lingkungannya.” Kader PKK RT 08 berpendapat: “Ada perubahan, dimana warga tidak sembarangan lagi membuang sampah, apalagi setelah warga mengeahui bahwa lingkungan mereka mengikuti Program BGC sehingga sampah tidak beserakan lagi. Penghijauan mulai terlihat dilingkungan RT 08, dimana warga mau menanam tanaman dalam pot-pot di rumahnya masing-masing. Ketua PKK RW 02 mempunyai pendapat yang sama, yaitu: “Pada umumnya lebih baik, lingkungan jadi lebih bersih. Warga peduli dengan kebersihan lingkungannya. Penghijauan lebih banyak lagi, di mana tiap rumah sudah mau menanam tanaman di dalam pot. Hal lebih terasa bila melihat Sungai Cidurian, dahulu di pinggir-pinggir sungai penuh dengan sampah tapi sekarang sudah bersih...”

Keikutsertaan masyarakat (perempuan) dalam pemanfaatan hasil kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga lebih terlihat lagi ketika para pengurus RW dan RT serta para Kader PKK mendirikan sarana Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD). Sarana pendidikan ini didirikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus RW dan RT beserta para Kader PKK dalam memanfaatkan hasil penjualan produk daur ulang yang mereka buat.

Hal ini diketahui ketika penulis menanyakan kepada pengurus Kader PKK mengenai



pemanfaatan hasil penjualan dari produk daur ulang yang mereka buat, beberapa kader PKK menjawabnya sebagai berikut:

Kader PKK RT 06: "Hasil dari penjualan tersebut selain disisihkan untuk biaya produksi kembali juga dipergunakan untuk berjalannya kegiatan PAUD." Kader PKK RT 07: "... Meskipun pada saat ini timbal balik pada warga dirasakan secara umum, yang salah satunya yaitu dengan adanya PAUD untuk anak-anak mereka." Kader PKK RT 08: "Pada saat ini hasil dari penjualan produk pengolahan sampah warga belum dirasakannya secara langsung/individu, karena program saat ini bukan untuk penghasilan tambahan. Pada saat ini hasil penjualan dari produk-produk olahan sampah digunakan untuk berjalannya kegiatan pendidikan PAUD, karena sarana yang pada saat ini sarana yang dimiliki PAUD masih minim. Jadi imbalan tidak dirasakan secara pribadi tetapi secara umum. "Untuk lebih memastikan hal tersebut penulis bertanya kepada Ibu Ketua PKK RW 02, dan beliau menjawab sebagai berikut: "Hasil penjualan dari produk-produk pengolahan sampah, hasilnya pada pertama kali digunakan untuk biaya operasional PAUD. Meskipun pada saat ini PAUD sudah tidak terlalu tergantung dari hasil penjualan produk pengolahan sampah, tetapi masih tetap ada sumbangan dari hasil olahan sampah untuk berjalannya kegiatan PAUD.

Berdirinya PAUD ini sangat bermanfaat bagi para ibu-ibu yang memiliki anak usia dini yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke Taman Kanak-Kanak tetapi tidak memiliki biaya untuk itu. PAUD DAHLIA tidak mengenakan biaya pada setiap anak yang mendaftar bahkan iuran untuk setiap bulan pun pada awalnya tidak ditarik bayaran. Meskipun pada saat ini telah dikenakan iuran untuk setiap bulannya berdasarkan kemampuan dan kesepakatan orang tua murid yaitu sebesar Rp. 5000,- untuk setiap bulannya per anak murid. Hal itu sangat meringankan keuangan orang tua murid karena seperti kita ketahui di lingkungan RW 02 tidak semua warganya mempunyai perekonomian yang mapan. Tidak hanya anak-anak yang berasal dari lingkungan RW 02 saja yang mendaftar bahkan dari luar pun ikut mendaftar yaitu lingkungan berdekatan dengan lingkungan RW 02, seperti warga yang berasal dari Bojong Koneng.

Meskipun pada saat ini berjalannya kegiatan PAUD tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada hasil penjualan produk daur ulang,

tetapi sumbangan dari hasil penjualan produk daur ulang masih tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki PAUD Dahlia masih kurang. Bahkan bisa dikatakan minim, salah satunya terlihat dari ruang kelas yang ada hanya satu ruangan sedangkan yang dibutuhkan minimal tiga ruangan yaitu untuk usia 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Dikarenakan yang tersedia hanya ada satu kelas maka pengurus PKK memanfaatkan teras ada di Balai RW untuk dipergunakan sebagai sarana belajar mengajar bagi murid tidak kebagian kelas.

Tidak hanya hal tersebut di atas saja yang dirasakan dari manfaat kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi juga dirasakan manfaatnya dalam memelihara Balai RW. Seperti telah disebutkan di atas bahwa sampah yang serahkan warga tidak semuanya dijadikan suatu produk, tapi ada sebagian yang dijual kembali kepada penampung, seperti dus, botol gelas, botol plastik, besi yang sudah terpakai dan benda lainnya yang sekiranya masih mempunyai nilai jual. Hasil dari penjualan itu dimanfaatkan untuk pemeliharaan Balai RW yaitu untuk biaya kebersihan, biaya perbaikan apabila ada yang rusak, insetif bagi penjaga balai, dan lain sebagainya. Sehingga hal itu semua tidak usah menjadi beban warga.

3. Tingkat Partisipasi

Dengan memperhatikan tingkat keterlibatan warga (perempuan) RW 02 dalam program pengelolaan sampah secara mandiri maka tingkat/drajat partisipasi perempuan dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga ini apabila menggunakan pendekatan teori Arnstein berada pada tingkat ketiga, yaitu kedaulatan rakyat atau *citizen control*.

Penulis berpendapat demikian karena dimulai dari keputusan untuk ikut serta dalam program ini, yang dilanjutkan dengan membuat perencanaan, kemudian melaksanakan program, hingga menikmati hasil kegiatan, semua keputusan mutlak berada ditangan warga RW 02. Seperti telah dikatakan oleh penulis sebelumnya, meskipun program ini berasal dari pemerintah Kota Bandung, tidak serta merta seluruh warga berkewajiban untuk melaksanakannya. Tetapi dibutuhkan kesanggupan dari warganya untuk melaksanakannya. Begitu pula dengan warga RW 02 ketika awal melaksanakan program ini dibutuhkan kesanggupan dari warganya agar mau ikut serta dalam melaksanakannya.

Keputusan warga RW 02 dalam menyanggupi untuk ikut serta dalam program ini diambil secara mutlak melalui rapat warga tanpa ada intervensi atau paksaan dari pihak mana pun. Warga (perempuan) secara sadar bermufakat untuk ikut serta dalam program pengelolaan sampah secara mandiri.

Begitu pula ketika dalam pelaksanaannya, baik itu dimulai dari pemilahan sampah yang dilakukan di rumah masing-masing warga, semua dilakukan oleh warga secara sadar dan mandiri tanpa ada keterpaksaan meskipun dengan menggunakan fasilitas yang sangat terbatas. Pada saat penyerahan hasil pemilahan pun warga dapat menyerahkannya ke Bank Sampah atau tidak.

Pada saat pengolahan pun dimana sampah kering yang diolah menjadi suatu produk jadi yang mempunyai nilai jual semuanya dikerjakan oleh warga (perempuan) RW 02 tanpa ada bantuan dari pihak lain. Meskipun sebelumnya ada kader PKK yang telah mengikuti pelatihan sampah daur ulang. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap dilakukan oleh kader PKK tersebut saja tanpa ada bantuan atau pengawasan dari pihak lain. Dalam hal ini dari panitia BGC Kota Bandung.

Begitu pula ketika menjual produk hasil daur ulang tersebut, penjualan dilakukan oleh para kader PKK baik secara langsung maupun melalui pameran-pameran. Dan hasil dari pada penjualan barang-barang tersebut keputusan penggunaannya dilakukan dalam rapat warga secara bersama-sama. Melalui kesempatan bersama maka hasil penjualan barang daur ulang dipergunakan untuk pendirian PAUD dan kebersihan di lingkungan RW 02.

Jadi pengelolaan sampah rumah tangga yang dimulai dari pemilahan hingga menikmati hasilnya semua dilakukan dan dirasakan oleh warga RW 02 tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Meskipun ada bantuan dari pihak ketiga tetapi itu tidak menyeluruh hanya pelengkap saja, seperti yang dilakukan oleh Rumah Zakat yang hanya membantu dalam memasarkan hasil produk daur ulang saja. Dan bantuan-bantuan tersebut tetap harus berada dalam pengawasan dan sepengetahuan para pengurus warga RW 02.

4. Faktor-Faktor Pendukung dan/atau Penghambat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

4.1. Faktor Internal

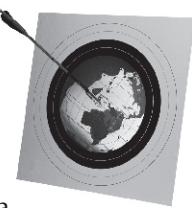
Faktor internal merupakan faktor-faktor

yang berasal dari diri perempuan itu sendiri dalam partisipasinya mengelola sampah rumah tangganya baik itu berupa dukungan maupun hambatan. Karena dalam pelaksanaannya partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada halangan dan dorongan yang menyebabkan pelaksanaan dengan pendekatan partisipatif tersebut tidak mudah untuk dilakukan.

a. Arti Penting Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat

Sebenarnya arti penting pengelolaan sampah rumah tangga bagi ibu-ibu di lingkungan RW.02 sudah dianggap penting. Hal itu terlihat dari wawancara yang penulis lakukan mengenai apakah penting program pengelolaan sampah dilakukan dan mereka semua menjawab penting meskipun dengan alasan yang beragam. Meningkatnya kesadaran arti penting pengelolaan sampah hal itu tidak terlepas dari dorongan para pengurus RW dan RT serta Kader PKK yang selalu mengajak warganya untuk ikut kerja bakti yang diteruskan dengan melakukan pemilahan dari sampah yang terkumpul. Selain itu banyak kegiatan lainnya yang bersifat penyuluhan kepada warganya mengenai manfaat dari melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dan yang lebih penting hal yang mendorong meningkatnya kebermaknaan pengelolaan sampah adalah hasil yang dirasakan oleh warga dari pengelolaan sampah tersebut. Secara langsung adalah lingkungan RW 02 menjadi lebih bersih, terutama Sungai Cidurian tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah bahkan bisa dikatakan bebas dari sampah. Yang tidak langsung adalah keberadaan PAUD, sarana pendidikan yang diperuntukan bagi putra-putri mereka yang dalam kegiatannya tidak memungut biaya dari orang tua murid. Karena semua dibiayai oleh hasil dari pada pengolahan sampah yang mereka (ibu-ibu) lakukan.

Sedangkan faktor penghambat dari arti dan kebermaknaan pengelolaan sampah bagi masyarakat adalah masih ada sebagian ibu-ibu yang belum mengerti mengenai hal tersebut. Belum mengerti di sini bukan berarti tidak mempunyai pendidikan yang cukup tapi tidak adanya keinginan dari diri perempuan itu sendiri untuk melakukan pengolahan sampah rumah tangganya secara mandiri. Tidak sedikit warga yang ada di lingkungan RW 02 mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi tidak mau melakukan pemilahan sampah. Sedangkan



ibu-ibu lainnya meskipun pendidikannya tidak begitu tinggi tapi mau melakukannya karena mereka tahu arti penting dari pengelolaan sampah yang mereka lakukan akan mereka rasakan manfaatnya di kemudian hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua PKK RW 02, yaitu: "Mereka sebagian besar ibu rumah tangga biasa, hanya 10% saja yang bekerja. Partisipasi ibu-ibu juga tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki, saya tidak melihat partisipasi ibu-ibu karena tingkat pendidikan. Tapi kemauan ibu-ibu yang dengan sukarela menyisihkan sebagian waktunya untuk turut serta dalam proses pengolahan sampah pada khususnya atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh PKK RW."

Faktor penghambat lainnya adalah ketidaktahuan dan ketidakmengertian mereka karena tidak tersampainya program tersebut kepada mereka, terutama kepada perempuan yang bekerja. Karena Kader PKK RT mengalami kesulitan ketika mengumpulkan perempuan yang ada di RT-nya untuk menyampaikan program-program yang akan mereka lakukan. Hal itu penulis alami sendiri ketika mengikuti salah satu pertemuan di salah satu RT di RW 02. Bagaimana Kader PKK harus bolak-balik memanggil ibu-ibu yang ada di RT-nya untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Tapi hanya sebagian ibu saja yang bisa hadir, sedangkan yang lainnya tidak bisa datang dengan berbagai alasan. Pada hal acara tersebut diisi oleh pihak ketiga (Rumah Zakat) yang berkaitan mengenai program pengelolaan sampah dan mereka mau bekerjasama mengenai hal tersebut. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Kader PKK RT 06 mengenai hal tersebut, yaitu: "Kendala yang dihadapi warga mungkin ketidaktahuan mereka mengenai program proses pemilahan sampah. Karena sebagian besar mereka mempunyai kegiatan masing-masing, mereka bekerja hingga sore hari. Jadi ketika ada pertemuan RT mereka sulit untuk hadir sehingga program yang akan disampaikan kepada mereka menjadi terkendala. Selain itu kesadaran dan kemauan warga itu sendiri untuk melakukan proses pemilahan sampah dirumahnya masing-masing."

b. Motivasi dan Kesadaran Masyarakat

Motivasi dan kesadaran di sini yaitu bagaimana dan atas dasar apa warga khususnya perempuan mau melakukan program pengolahan sampah rumah tangga ini. Apakah hanya suatu kebijakan semata yang harus

dilaksanakan oleh seluruh warga, atau telah ada kesadaran dan pengertian dari warga itu sendiri (perempuan) mengenai manfaat dari program pengelolaan sampah tersebut.

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa pada mulanya program ini diluncurkan karena termotivasi oleh ibu-ibu Kader PKK yang telah mendapat pelatihan membuat produk dari hasil daur ulang. Ibu-ibu melihat bagaimana manfaat yang akan diperoleh oleh warga apabila hal tersebut dilaksanakan di lingkungan mereka. Ditambah rasa peduli para kader PKK terhadap permasalahan sampah yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Kader PKK RT 09: "...Karena kalau sampah makin banyak kemana harus dibuang? Sedangkan lahan pembuangan sampah makin sempit."

Meskipun pada dasarnya warga (perempuan) melaksanakan program pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pengurus RW dan RT semata. Seperti yang disampaikan oleh Kader PKK RT 08 ketika dipertanyakan apa yang menjadi motivasi ibu-ibu untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, beliau menjawab: "Pada saat ini hanya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh RT dan RW."

Tetapi seiring dengan waktu dan kegiatan-kegiatan yang selalu diselenggarakan oleh para pengurus, motivasi warga (perempuan) mulai berubah dan kepedulian dalam penanganan akan sampah mulai meningkat. Berbagai macam kegiatan dilakukan yang bertujuan untuk memotivasi warga dan menyadarkan mereka mengenai besarnya manfaat yang akan mereka peroleh sehingga mendorong mereka mau melaksanakan program tersebut. Mulai dari kegiatan kerja bakti yang selalu rutin dilaksanakan di lingkungan RW 02, pelatihan-pelatihan yang selalu diadakan di Balai RW dengan melibatkan warga di dalamnya. Tidak lupa penyuluhan selalu rutin disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada warga.

Hal lainnya yang mendorong perempuan untuk ikut serta dalam program ini adalah ketertarikan mereka ketika melihat produk yang dibuat dari hasil sampah yang telah dipilah ternyata menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai ekonomis. Yang apabila mereka mau berpartisipasi melakukannya akan menjadi suatu tambahan penghasilan bagi keluarga mereka. Seperti Ketua PKK RW 02 sampaikan, yaitu: "Mereka mengetahui bahwa hasil dari pemilahan sampah yang mereka

lakukan akan menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat menambah penghasilan mereka. Di setiap kesempatan kader selalu menunjukan kepada ibu-ibu hasil dari pengolahan sampah tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ibu-ibu di RW 02 termotivasi untuk ikut serta dalam program tersebut.

Kader PKK RT 09 pun mengatakan yang sama: "Bisa menambah penghasilan rumah tangga, karena nilai dari penjualan hasil produksi sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat menunjang ekonomi keluarga apabila warga mau melakukannya."

Mengenai kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangganya makin meningkat manakala dirasakan kebersihan di lingkungannya makin lebih baik. Warga sangat menyadari bahwa kebersihan lingkungan akan berdampak pada kesehatan mereka, dimana kesehatan keluarga akan menjadi lebih baik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dari motivasi dan kesadaran warga salah satunya adalah tidak adanya timbal balik yang diterima warga atas sampah yang telah mereka pilah dan serahkan ke Bank Sampah (Balai RW). Warga menyerahkannya secara sukarela. Seperti yang disampaikan oleh kader PKK RT 06 mengenai tersebut: "Sebagian besar dari mereka tidak memperoleh imbalan dari hasil pemilahan sampah yang mereka setorkan, mereka menyerahkannya secara sukarela."

Meskipun ada imbalan yang diterima atas sampah yang disetor tapi bukan untuk sampah kering yang akan diolah kembali menjadi suatu produk. Biasanya sampah kering berupa dus, besi-besi, botol kemasan air mineral dan lain sebagainya yang biasanya dijual kembali ke pengumpul barang bekas. Itu pun tidak banyak hanya beberapa orang saja, sebagian besar tetap menyerahkannya secara sukarela.

Hal lain yang menghambat motivasi mereka dalam berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah yang berkaitan dengan produk-produk yang mereka gunakan sehari-hari. Tidak semua ibu rumah tangga yang ada di lingkungan RW 02 menggunakan/membeli produk yang kemasannya dipergunakan dalam proses daur ulang. Walaupun membeli jumlahnya hanya satu atau dua kemasan yang terkumpul dalam satu bulan. Dan itu membuat mereka malas untuk mengumpulkannya. Salah satu contohnya membeli minyak goreng, tidak semua ibu-ibu mampu membeli minyak goreng

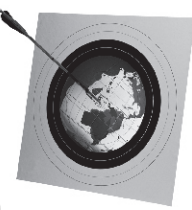
dalam kemasan, sebagian lainnya hanya mampu membeli dalam bentuk eceran yang dikemas dalam kantong plastik biasa, yang tentu saja kemasan tersebut tidak bisa dipakai dalam produksi daur ulang. Atau dalam penggunaan pawangi pakaian di mana tidak semua ibu-ibu mampu membeli dalam kemasan besar, yang biasanya dalam pembuatan produk daur ulang dibutuhkan kemasan yang besar, mereka hanya mampu membeli dalam kemasan sashet saja. Seperti yang disampaikan oleh kader PKK RT 04: "...Tetapi mereka tetap tidak ikut berpartisipasi, karena tidak semua ibu membeli produk seperti yang disebutkan diatas. Meskipun membelinya hanya satu dua saja sehingga tanggung untuk memisahkannya atau lama terkumpulnya menjadi banyak. Karena tidak sabar mengumpulkannya jadi terpaksa disatukan kembali dengan sampah lainnya."

Faktor lainnya yang menghambat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri salah satunya adalah mereka beranggapan itu bukan menjadi tanggung jawab mereka karena mereka telah membayar retribusi sampah setiap bulannya. Terutama penduduk musiman (kost atau kontrak) biasanya mereka menyerahkan masalah ini kepada yang si empunya rumah. Hal itu seperti terungkap dari pernyataan Kader PKK RT 09: "Mereka belum terlibat dalam program tersebut secara langsung. Mereka yang kos-kosan menyerahkan masalah sampah ini kepada yang mempunyai rumah. Mereka hanya cukup memasukan sampah tersebut ke dalam kantong plastik untuk diangkut petugas sampah karena mereka sudah membayar retribusi sampah setiap bulannya."

c. Fasilitas Yang Dimiliki Masyarakat

Faktor internal yang ketiga ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengelolaan sampah. Faktor yang mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki yaitu dengan adanya Bank Sampah, di mana warga (perempuan) dapat menyerahkan hasil pemilahan sampahnya ke tempat tersebut. Sebenarnya tidak hanya sampah kering tetapi juga sampah basah. Tetapi pada saat ini baru sebagian besar yang diterima adalah sampah kering saja, untuk sampah basah hanya sampah bekas sayuran saja yang diterima untuk yang lainnya belum. Jadi masih terbatas.

Selain sarana itu waktu penyerahannya pun



dapat dilakukan dari pukul 11.00 hingga pukul 14.00 WIB, dari hari Senin hingga Jumat yang diberikan secara langsung kepada petugas yang menerima hasil pemilahan. Tetapi pada kenyataannya ibu-ibu menyerahkannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mereka menyerahkannya apabila ada waktu dan kesempatan. Hal itu dikarenakan tugas rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ketu PKK RW 02: "Sebenarnya jadwal penyerahan sampah telah ada. Di Balai sendiri ada yang jaga yang akan menerima sampah kering yang diserahkan warga setiap harinya, yaitu Pak Ulloh dan Pak Engkus. Tetapi kadang-kadang ada saja warga yang menyerahkan sampahnya tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal itu dikarenakan tugas-tugas rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan..."

Faktor lainnya yang mendorong ibu-ibu agar mau ikut serta dalam kegiatan ini yaitu selalu ada kegiatan pelatihan yang ada berkaitan dengan daur ulang sampah baik yang diselenggarakan oleh pihak PKK maupun dari pihak luar. Selain itu kehadiran Kader PKK baik RT maupun RW selalu siap sedia membantu ibu-ibu dalam memberikan penerangan mengenai bagaimana proses pengolahan sampah sebaiknya. Terkadang mereka juga menerima juga hasil pemilahan sampah kering yang dilakukan oleh warga karena warga merasa enggan menyerahkannya langsung ke Bank Sampah. Hal itu seperti yang dialami oleh Kader PKK RT 06, yaitu: "...Untuk hasil pemilahan sampah yang telah terkumpul kadang-kadang warga menitipkannya kepada saya untuk dibawa ke bank sampah agar dapat diproses lebih lanjut menjadi suatu produk, mereka tidak ikut secara langsung hanya menitipkan saja"

Dengan adanya Kader PKK ini sedikit banyak akan sangat membantu ibu-ibu yang ada di RW 02 yang berkeinginan untuk turut berpartisipasi dalam program ini. Tetapi terkendala oleh berbagai hal yang mengakibatkan ibu-ibu tersebut tidak dapat turut serta di dalamnya. Ketersediaan waktu dan tenaga yang diberikan para Kader PKK ini sangat berarti dalam terlaksananya program pengelolaan sampah ini.

Adapun hambatan yang paling menonjol yang dihadapi warga dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki warga adalah tidak tersedianya tempat proses pengelolaan sampah yang belum memadai yang dimiliki oleh setiap warga. Pada saat ini dapat dikatakan warga

mempergunakan fasilitas seadanya saja, fasilitas yang sekiranya dapat warga sediakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam menyediakan sarana, dalam hal ini penyediaan tempat sampah, untuk melakukan pemilahan sampah seharusnya warga mempunyai tempat sampah yang terdiri dari tiga tempat dengan wadah tertutup rapih. Tetapi karena keterbatasan kemampuan, para ibu rumah tangga yang ada di lingkungan RW 02 menyediakan tempat sampah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mempergunakan kaleng bekas, ember plastik, dan yang paling banyak dipergunakan adalah kantong plastik. Kantong kresek atau plastik sangat mudah diperoleh. Karena mudah dan murah tersebut sehingga para ibu tidak usah lagi repot-repot mengeluarkan biaya dan tidak perlu khawatir tempat sampahnya hilang apabila terbuat dari bahan yang bagus. Karena sudah menjadi rahasia umum apabila tempat sampahnya bagus karena terbuat dari plastik atau kaleng dan diletakan diluar rumah maka keberadaan tempat sampah itu tidak akan terjamin. Biasanya akan hilang cepat atau lambat. Maka penggunaan kantong plastik merupakan sarana yang mudah dalam mengatasi permasalahan fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga dalam melakukan proses pemilahan sampah. Seperti yang disampaikan oleh Kader PKK RT 05: "Sebenarnya tong sampah telah ada, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan warga yang berjumlah banyak. Karena hanya satu tong saja yang tersedia yang diberikan oleh pihak RW sedangkan warga RT 05 berjumlah 55 KK. Jadi pada saat ini penggunaan kantong plastik merupakan solusi yang mudah yang dapat disediakan oleh warga dalam menampung sampah rumah tangganya. Begitu pula yang dilakukan oleh warga yang telah melakukan pemilahan sampah dimana dalam proses pemilahan sampahnya warga melakukannya secara langsung dengan menggunakan dua kantong plastik untuk memisahkan antara sampah kering dengan sampah basah.

Begitu pula yang disampaikan oleh Kader PKK RT 06: "...Ketidakterseedianya tempat khusus untuk proses pemilahan sampah yang ada di setiap rumah warga baik penempatannya maupun wadahnya menjadi kendala lainnya. Sebenarnya pernah juga ada tong sampah yang diberikan disetiap rumah warga yang diletakan di depan rumah, tetapi yang terjadi kemudian tong sampah itu hilang entah siapa yang

mengambilnya. Maka ke depan perlu dipikirkan sebaiknya tempat sampah diletakan di mana supaya tidak hilang. Kader PKK RT 07 menyampaikan hal yang sama, yaitu: "Yang dipergunakan adalah tong sampah plastik yang biasanya ditempatkan di depan rumah. Tetapi sebagian warga lainnya menggunakan kantong plastik untuk menampung sampah rumah tangganya. Hal itu karena perilaku pemulung yang kurang baik, apabila menggunakan tong sampah plastik tong sampah tersebut sering kali diambil oleh pemulung tersebut. Maka lebih baik menggunakan kantong plastik, lebih mudah dan murah.

Kader PKK RT 08 pun mengatakan yang sama, yaitu: "Sarana yang dimiliki RT 08 sangat minim, di mana RT 08 hanya memiliki dua unit tong sampah untuk seluruh RT. Kalau untuk tempat sampah yang ada di rumah warga mereka mempunyai tempat sampah masing-masing yang biasanya berasal dari bekas kaleng cat atau ada juga yang menggunakan kantong plastik dengan dua tempat.

Kader PKK RT 09 mengungkap hal yang sama, yaitu: "Mengenai sarana khusus untuk memilah sampah rumah tangga yang ada di setiap rumah tangga belum ada. Warga hanya menggunakan kantong plastik bekas untuk menampung sampah yang ditimbulkannya. Program pengadaan tempat sampah khusus untuk disetiap rumah warga belum ada, yang ada hanya satu unit tong sampah yang disediakan oleh RW. Hal itu tentu saja tidak mencukupi untuk menampung seluruh sampah yang ada di RT 09.

Sebenarnya tong sampah telah disediakan tapi jumlahnya tidak memadai. Karena jumlah tong sampah yang akan dibagikan tidak sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang ada di lingkungan RW 02. Seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa Kader PKK RT di atas. Bahwa tiap RT hanya diberi satu atau dua unit saja, tentu saja itu sangat jauh dari yang diperlukan. Jadi tong sampah tersebut hanya diletakan pada tempat umum saja.

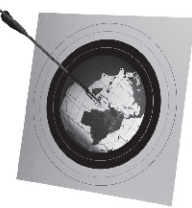
Faktor lain yang dapat jadi hambatan adalah cara menempatkan tempat sampah tersebut. Karena lingkungan RW 02 merupakan padat penduduk dengan kondisi rumah penduduk yang berdempet-dempetan. Rumah warga pun tidak sedikit yang ukurannya tidak begitu besar. Sehingga sedikit banyak mengalami kesulitan ketika meletakan tempat sampah terutama tempat sampah yang mempunyai dua tempat atau tiga tempat yang cukup memakan tempat.

Sehingga penggunaan kantong kresek juga dianggap lebih tepat karena penempatannya tidak membutuhkan tempat yang luas. Cukup mengantungnya dengan menggunakan paku. Berbeda apabila menggunakan tong sampah yang tentu akan menggunakan lahan cukup banyak. Bila diletakan di dalam rumah tidak bisa karena sempit. Disimpan di luar juga sulit karena tidak mempunyai pekarangan sehingga menghalangi jalan untuk warga yang lalu-lalang, karena jalan-jalan di lingkungan RW 02 sebagian berukuran kecil atau berupa gang-gang sempit. Resiko lainnya bila tempat sampah diletakan di luar yaitu sampah suka diacak-acak binatang (kucing) atau juga oleh pemulung. Bahkan tempat sampah yang terbuat dari plastik atau yang bagus beresiko untuk hilang.

d. Waktu

Waktu di sini merupakan waktu yang dipergunakan dalam melakukan proses pengolahan sampah. Dalam melakukan pemilahan sampah dan menyerahkan hasil pilahan tersebut warga dapat melakukannya tanpa harus terikat dengan waktu yang ditentukan. Yaitu ketika ibu-ibu melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dan untuk perempuan warga RW 02 yang turut serta melakukan pemilahan dilakukan secara langsung ketika sampah itu timbul karena mereka telah menyiapkan dua wadah yang diperuntukan untuk sampah kering dan sampah basah. Jadi mereka tidak meluangkan waktu khusus untuk melakukan pemilahan.

Begitu pula waktu penyerahan sampah kering tersebut ke Bank Sampah tidak dibatasi. Untuk jenis sampah yang akan diserahkan tidak ada ketentuan waktunya. Warga dapat menyerahkan apa pun jenis sampah keringnya. Tetapi memang untuk waktu penyerahannya sebenarnya telah ada jadwalnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa penyerahan sampah kering dilakukan tiap Hari Senin hingga Jumat, dengan waktu dari pukul 11.00 s.d. 14.00 WIB. Tetapi itu tidak menjadi menjadi keharusan, karena pada kenyataannya ibu-ibu menyerahkan sampah keringnya ke Balai RW ketika mereka mempunyai kesempatan untuk mengantarkannya tanpa harus melihat waktu. Kadang-kadang lebih awal atau sudah sore. Tidak melihat hari kerja atau hari libur, sepanjang ada petugas yang menerimanya mereka menyerahkannya. Begitu pula petugas



tidak merasa berkeberatan dalam menerimanya meskipun bukan jadwalnya.

Begitu pula ketika kegiatan dalam melakukan pengolahan sampah yang telah diserahkan oleh warga, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan pada waktu yang sekiranya ibu-ibu dapat hadir untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yaitu ketika segala urusan rumah tangga telah selesai dilakukan. Atau ketika ada kegiatan kerja bakti yang biasanya dilakukan ketika hari libur, sehingga tidak mengganggu pekerjaan pokok warga.

Untuk hal yang menghambat pada waktu ketika melakukan pengolahan sampah yaitu salah satunya tidak pandai mengatur waktu. Waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk urusan rumah tangga. Terlebih lagi apabila mempunyai anak kecil. Begitu pula dengan pekerjaan, terutama ibu-ibu yang bekerja baik di sektor formal maupun informal, mereka tentu saja lebih mengutamakan waktu untuk pekerjaannya demi kelangsungan hidupnya.

e. Gaya Hidup dan Kebiasaan Masyarakat

Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa warga yang berada di lingkungan RW 02 tidak hanya terdiri dari penduduk asli tetapi juga pendatang, baik yang telah menjadi penduduk tetap maupun masih musiman. Mereka masing-masing mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda, ditambah dengan latar belakang yang berbeda-beda baik dilihat dari tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi. Hal tersebut berpengaruh dalam gaya hidup serta kebiasaan masyarakat.

Hal yang mendorong warga untuk turut serta dalam program pengolahan sampah secara mandiri dalam gaya serta kebiasaan adalah dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting dari kebersihan. Karena dengan rasa peduli dan turut serta dalam pengelolaan sampah yang ada di lingkungannya akan membuat rumah warga dan sekitarnya menjadi lebih bersih. Hal itu tentu saja akan berdampak pula pada tingkat kualitas kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut dimana menjadi lebih baik, karena lingkungan yang bersih akan menjauhkan berbagai jenis penyakit dari kehidupan manusia.

Sedangkan menjadi penghambat adalah kebiasaan di mana dalam melakukan segala sesuatu ingin cepat dan mudah, tidak mau repot. Ditambah dengan ketidakpedulian warga terutama warga musiman yang akan membuat program pengolahan sampah rumah tangga ini

kurang berjalan efektif dan efisien.

Karena ada kebiasaan di lingkungan RW 02 dalam hal sampah ini, dimana sebelum program ini dijalankan warga di sana warga menyerahkan sampah rumah tangganya kepada petugas sampah tanpa dipilah terlebih dahulu, karena pemilahan dilakukan oleh petugas sampah itu sendiri secara langsung. Jadi warga tidak perlu repot-repot melakukannya karena sudah ada yang menjalankan kegiatan tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh petugas sampah kepada penulis: "... Begitu juga untuk warga, mereka kadang-kadang suka malas memilah sampah. Jadi saya sendiri yang memilah sampah. "...Dan sebagian lainnya mungkin belum mengerti dan belum mau melaksanakannya. Pingin praktisnya saja."

4.2. Faktor Eksternal

a. Keteladanan Kepemimpinan/Pemuka Masyarakat

Faktor yang mendorong agar warga (perempuan) bersedia berpartisipasi dengan sukarela melalui keteladanan pemimpin adalah tercemrin dari sikap para pengurus RW dan RT serta jajarannya dalam mengajak seluruh warga khususnya ibu-ibu untuk ikut serta dalam program pengelolaan sampah ini secara mandiri. Mereka mengajak warganya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat warganya tertarik. Menghimbau melalui sikap dan perbuatan agar warga dengan sukarela turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak RW maupun RW. Para pengurus tidak pernah memaksakan program ini sebagai suatu keharusan yang kaku dimana masyarakat harus melaksanakannya tanpa kecuali. Tetapi mereka lebih menyukai apabila warganya bersedia melaksanakannya dengan sukarela tanpa paksaan.

Para jajaran pengurus RW dan RT berharap melalui kegiatan yang dilakukan tersebut pesan-pesan dapat tersampaikan dan dimengerti oleh warganya. Dari penyuluhan-penyuluhan yang selalu rutin disampaikan baik pada pertemuan RT maupun RW dapat meningkatkan kesadaran warganya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya, yang salah satunya mengenai program pengelolaan sampah rumah tangga.

Para Ketua RT maupun RW selalu bersedia mendengarkan keluhan-keluhan ataupun masalah yang disampaikan oleh warganya. Kemudian melalui musyawarah apa yang menjadi keluhan dan masalah oleh warga

tersebut oleh Ketua RW maupun para Ketua RT dibicarakan bersama berusaha untuk mencari jalan keluarnya dari masalah itu.

Adapun faktor yang menjadi penghambat dari seorang pemimpin dalam mendorong agar warganya untuk turut serta dalam program pengelolaan sampah ini adalah tidak diberikan sanksi yang tegas terhadap warga yang melanggar aturan yang telah mereka sepakati. Meskipun telah terpasang tanda larangan beserta hukumannya di beberapa tempat di lingkungan RW 02 tetapi apabila ada warga yang melanggar Ketua RW tidak pernah memberikan hukum yang tegas sesuai dengan yang tertera dalam spanduk tersebut. Yang ada hanya teguran halus atau tidak langsung. Jadi hal tersebut tidak dapat membuat orang takut apabila melakukannya.

Begitu pula terhadap warga yang tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangganya. Tidak ada teguran dan sanksi secara langsung kepada warganya. Seperti yang ditanyakan penulis kepada beberapa kader PKK mengenai sanksi bagi warga yang tidak ikut serta dalam program pengolahan sampah jawabannya seperti dibawah ini. Kader PKK RT 06 menjawab sebagai berikut: "Mengenai sanksi tentu ada, tetapi berjalan tidaknya sanksi tersebut tidak tahu dengan pasti. Meskipun tentang peraturan dan sanksi yang akan diterima apabila warga melakukan pelanggaran dipampang di pinggir jalan. Dan mengenai tindakan itu merupakan wewenang Pak RT. "Kader PKK RT 07 menyatakan sebagai berikut: "Pada saat ini belum ada tindakan." Kader PKK RT 08 menjawab sebagai berikut: "Belum ada sanksi, yang mau mengikuti program ini silahkan yang tidak juga tidak dipaksakan untuk ikut...."

Melalui penegakan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama tentu diharapkan program ini dapat dilaksanakan di setiap rumah warga di lingkungan RW 02. Tidak hanya sanksi saja yang diberikan kepada warga yang melanggar tetapi sebaiknya diberikan pula penghargaan terhadap warga yang telah melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya dengan baik dan benar sehingga ada rasa bentuk penghargaan yang diberikan oleh pengurus RT maupun RW terhadap apa yang telah mereka lakukan.

b. Tingkat Penyuluhan dan Pembinaan

Faktor yang mendorong penyuluhan dan

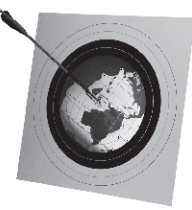
pembinaan rutin dilakukan di lingkungan RW 02 adalah adanya tekad para pengurus RW dan RT berserta Kader PKK untuk melaksanakan program ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tekad tersebut maka penyuluhan dan pembinaan selalu dilakukan diberbagai kesempatan. Mulai dari pertemuan RT yang rutin dilakukan setiap bulannya di RT-nya Masing-masing, kemudian pertemuan RW yang juga dilakukan tiap bulannya yang dapat dihadiri oleh seluruh warga RW 02. Selain itu penyuluhan dan pembinaan pun dilakukan dalam kegiatan lainnya sebagai strategi untuk mengajak warga untuk ikut serta dalam program pengolahan sampah ini, seperti kerja bakti, perlombaan antar RT, senam bersama dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu saja, dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan pihak RW juga melibatkan pihak lainnya, pihak ketiga, yaitu Rumah Zakat dalam membina warganya dalam program pengolahan sampah daur ulang ini. Rumah zakat ini tidak hanya menampung hasil dari sampah daur ulang saja tetapi juga memberi pembinaan kepada warga agar turut terlibat di dalamnya. Mereka memberikan penyuluhan mengenai manfaat dan dampak dari pengolahan sampah rumah tangga secara mandiri. Selain dari pada itu mereka pun menyediakan modal usaha bagi warga yang berkeinginan membuka usaha rumahan serta turut memasarkan hasilnya.

Sedangkan faktor yang menghambat yang berkaitan dengan penyuluhan dan pembinaan ini adalah terbatasnya jumlah motivator yang telah mengikuti secara khusus pelatihan mengenai bagaimana pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan benar. Saat ini baru empat orang saja yang telah mengikuti pelatihan motivator dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Tentu hal ini tidak sebanding dengan jumlah warga yang harus dihadapi.

c. Pengawasan dari Kader atau Pemimpin

Pengawasan ini dilakukan oleh setiap pengurus RW atau RT, khususnya para kader PKK. Pengawasan dilakukan didorong berdasarkan rasa tanggung jawab akan terlaksananya program ini. Pengawasan oleh para kader dilakukan tidak secara khusus tetapi dilakukan ketika para kader tersebut berkeliling disekitar rumah warga di RT-nya masing-masing. Mereka mengawasi bagaimana keadaan lingkungan di RT-nya, apakah warga telah melaksanakan program tersebut atau belum.



Pengawasan itu pun dilakukan ketika mengadakan pertemuan rutin dengan warganya, dimana para kader PKK akan selalu mempertanyakan apakah ibu-ibu telah melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing, juga mempertanyakan adakah kesulitan yang ibu-ibu hadapi dalam hal tersebut. Biasanya kader PKK tersebut akan memberikan bantuan untuk mencari jalan keluarnya.

Mengenai faktor penghambat dalam pengawasan program ini adalah tidak adanya tim khusus yang bertugas mengawasi jalannya program ini. Program ini hanya diawasi bersama-sama antar pengurus RW dan RT serta Kader PKK. Warga pun dalam hal ini tidak turut dilibatkan. Pengawasan secara khusus hanya dilakukan oleh panitia BGC yang kedatangannya pun tidak rutin. Mereka datang apabila akan melakukan penilaian saja. Dan tidak dilakukan rutin pada waktu tertentu.

d. Perilaku Pemulung

Untuk pemulung ini, perilakunya lebih cenderung sebagai faktor penghambat saja. Karena pada kesehariannya para ibu-ibu sering dibuat kesal karena perilakunya terhadap sampah yang telah warga rapihkan. Mereka biasanya akan mengorek-ngorek sampah yang telah terbungkus rapih. Mereka mengira barang yang mereka cari ada di dalamnya. Karena perbuatannya itu sampah jadi berantakan dan berserakan sehingga warga atau ibu-ibu harus merapikannya kembali.

Tidak hanya itu saja tetapi pemulung juga suka mengambil tempat sampahnya terutama tempat sampah yang terbuat dari plastik atau bahan lainnya yang mempunyai nilai jual. Dengan tidak bermaksud menyamaratakan bahwa semua pemulung mempunyai perilaku seperti itu, tetapi itulah yang dirasakan oleh warga RW 02. Seperti yang diutarakan oleh Kader PKK RT 07, yaitu : "...Hal itu karena perilaku pemulung yang kurang baik, apabila menggunakan tong sampah plastik tong sampah tersebut sering kali diambil oleh pemulung tersebut..." Hal yang sama disampaikan oleh Kader PKK RT 06, yaitu : "...Hal itu dilakukan karena perilaku pemulung yang kurang baik, yang suka mengacak-acak sampah tersebut bahkan tempat sampahnya pun kadangkala suka diambil." Dengan perilaku seperti yang telah disampaikan di atas tentu sedikit atau banyaknya akan menghambat berjalannya program pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri oleh warga

masyarakat RW 02.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis dan temuan di lapangan, maka ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler telah terjadi pada setiap tahapan pengelolaan sampah dengan dengan berbagai dinamikanya. Untuk tahapan proses awal pengelolaan sampah rumah tangga, berupa pemilahan sampah antara sampah kering dan sampah basah ditemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga telah diikuti oleh sebagian besar perempuan yang berada di lingkungan RW 02. Kemudian pada proses kedua yaitu proses pengolahan sampah yang telah dipilah untuk diolah kembali menjadi suatu produk jadi, partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga ini animonya mulai berkurang. Pada proses ketiga dimana hasil produk daur ulang dipasarkan, ternyata tahap dimana partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga ini semakin berkurang. Dapat dikatakan hanya para Kader PKK saja yang terlibat dalam proses ini. Kemudian pada proses yang terakhir yaitu proses dalam menikmati hasil kegiatan program pengelolaan sampah rumah tangga. Pada tahapan ini partisipasi masyarakat menjadi tinggi kembali, karena dalam menikmati hasil kegiatan ini, tidak hanya oleh perempuan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan semata tetapi dinikmati oleh seluruh warga yang berada di lingkungan RW 02. Hal ini terjadi karena ada upaya dari pihak RW untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang lain, yang tidak terlibat, untuk pada waktu-waktu mendatang terlibat juga dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya.
2. Faktor pendukung dalam partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler terbagi dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: makin

- meningkatnya kesadaran perempuan akan manfaat dari pengolahan sampah secara mandiri; adanya nilai ekonomi yang akan diterima apabila melakukan pengolahan sampah; adanya tempat penyerahan sampah atau bank sampah; fleksibilitas waktu dalam melakukan pengolahan sampah; makin meningkatnya rasa peduli perempuan akan arti penting dari kebersihan. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi: para jajaran pengurus selalu memberikan contoh/teladan pada warganya dalam pengelolaan sampah; melakukan pembinaan / penyuluhan kepada warga (perempuan) secara rutin; dan kesiapan para kader PKK apabila warga membutuhkannya.
3. Faktor penghambat dalam partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW. 02 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler terbagi juga dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : tidak ada kesadaran dan kemauan dari perempuan itu sendiri, tidak adanya timbal balik yang dirasakan oleh warga (perempuan) secara individu atas sampah yang mereka diserahkan, minimnya sarana yang dimiliki warga (perempuan) dalam proses pengolahan sampah, lebih mengutamakan urusan rumah tangganya, dan gaya hidup yang praktis, cepat, dan mudah. Sedangkan faktor penghambat eksternal meliputi : tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemimpin kepada warga yang melanggar, terbatasnya motivator yang ada, tidak adanya tim khusus dalam melakukan pengawasan dan evaluasi serta perilaku pemulung yang nakal.
 2. Menyediakan sarana pemilahan sampah yang memadai bagi setiap warga yang ada di lingkungan RW 02, dengan memperhatikan bentuk dan terbuat dari apa bahan sebaiknya dibuat agar tidak mudah hilang. Untuk hal ini penulis sarankan untuk menggunakan kantong plastik, selain mudah dan murah juga penempatannya tidak memakan tempat. Kantong tersebut diberi warna tertentu untuk membedakan antara sampah kering dan sampah basah.
 3. Membentuk lembaga keuangan, dalam hal ini koperasi. Untuk menampung semua hasil penjualan sampah yang disetor oleh warga kepada bank sampah, dimana warga yang telah menjadi anggota koperasi akan mempunyai buku tabung masing-masing yang akan menampung semua transaksi dari hasil penyeteroran sampahnya.
 4. Menegakkan peraturan yang telah disepakati, yaitu memberikan sanksi kepada warga apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Bentuk sanksinya berupa sanksi sosial, misalnya warga yang tidak patuh memilahkan sampahnya diberikan bendera putih di depan rumahnya atau menegakkan sanksi yang telah tertera pada Undang Undang K3, salah satu contohnya denda dengan berupa uang.
 5. Memberikan penghargaan apapun bentuknya kepada warga perempuan yang telah melakukan proses pengelolaan sampah rumah tangganya dengan baik dan benar. Penghargaan itu dapat berupa piagam penghargaan, tidak dikenakan retribusi sampah untuk beberapa bulan atau bentuk lainnya yang dapat memotivasi mereka agar bersemangat untuk melakukan proses pengelolaan sampah rumah tangganya secara mandiri.
 6. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang sekiranya akan membantu program pengelolaan sampah ini agar menjadi lebih baik. Dalam hal ini seperti mencari sponsor yang sekiranya dapat memberikan bantuan berupa tempat sampah yang dibutuhkan warga dengan imbalan sponsor tersebut dapat mengiklankan produknya di tempat sampah tersebut.

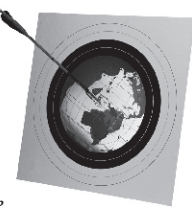
Berdasarkan temuan di atas maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Selalu memberikan motivasi kepada seluruh warga, khususnya kaum perempuan di RW 02 agar mau melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkesinambungan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan menunjukkan produk-produk yang dihasilkan dari proses daur ulang yang merupakan hasil dari pengolahan sampah sehingga dapat menarik minat warga perempuan lainnya untuk mau melakukan proses pengolahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta



- Bungin, Burhan (ed). 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (ed ketiga, terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Cresswell, John W., 2003. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Second Edition. California. USA: Sage Publication. Thousand Oaks.
- Denzin, Norman. K., & Yvonna S. Lincoln. 2005. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Third Edition. London: Sage Publication.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta. Balai Pustaka
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung. Humaniora
- Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Dalam Sastrawan Manullang, dkk (ed terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kirk, Jerome and Marc L. Miller. 1989. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Newbury Park: Sage Publication.
- Milles, Matheuw. B. & A. Mitchel Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills: Sage Publication. Inc.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rijal, Tadjoer. 2006. *Metode Bricolage dalam Penelitian Sosial, dalam Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Burhan Bungin (ed). Jakarta: Rajawali Press.
- Roesmidi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soma, Soekmana. 2010. *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*. Seri; Pengelolaan Sampah Perkotaan. Bogor: IPB Press.
- Suparjan & Suyatno, H. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Edisi Ke-1. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aditya Media.
- Safi'i. 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Malang. Averroes Press
- Safi'i. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Malang. Averroes Press
- Silalahi, Ulbert. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Tjokrowinoto, Moelyarto, 2001. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Jurnal, Majalah, Tesis, Skripsi**
- Chairi, Anis., 2007. Thesis S2 *Mungkinkah dengan Pendekatan Kualitatif?*. Makalah disajikan pada Kuliah Umum Program Studi Magister Manajemen Universitas Muria. Kudus.
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2003. Buletin ADIPURA Liberti. Edisi Kedua. Mei. Jakarta: Bumi Prasidi Bi-Epsi.
- Moeliono, Laurike. 2001. *Metode dan Analisis Focus group Discussion dalam Penelitian Kualitatif*. dalam Jurnal Penelitian Lembaga Penelitian, No. 11, Agustus 2001, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Sasmita, Wulan Tri Eka, 2009. *Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* (Studi Kasus: Pengelolaan Sampah Terpadu Gerakan Peduli Lingkungan (GPL) Perumahan Pondok Pekayon Indah, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan). Tesis: Institut Pertanian Bogor.
- Riawanti, Selly. 2010. *Metode Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Makalah dalam Kegiatan Pembekalan terhadap Dosen Pembimbing di STIA LAN Bandung, 31 Mei 2010, Bandung.
- Referensi dari Internet**
- _____. 2007. *Sampah di Indonesia*. <http://www.wordpress.com>
- _____. 2010. *Bandung (Bukan) Lautan Sampah (?)*.
- E. Kurniawan. 2010. *Pengelolaan Sampah di Indonesia*. <http://www.iec.co.id>
- Dream Indonesia. _____. *Bank Sampah Pertama di Dunia dari Indonesia*. <http://www.indonesiaberpres.co>
- Gandapurnama, Baban. 2010. *PD Kebersihan Targetkan Tekan Volume Sampah Hingga Delapan Persen*. <http://www.detik.com>
- Handriansyah, Hendri. _____. *Penanganan Masalah Sampah di Indonesia*. <http://www.alpensteel.com>
- Kompas. _____. *Bank Sampah Dibangun di Padang*. <http://idblognetwork.com>
- Rosalina, M. Putri. _____. *Karut Marut Kelembagaan Sampah Indonesia*. <http://www.dml.or.id>
- Raharjo, Slamet. _____. *Perbaikan Pengelolaan Sampah di Indonesia*. <http://io.ppijepang.org>
- Rizky, Miradln S. 2010. *Menjadikan Sampah Sebagai Sahabat*. <http://www.batavia.co.id>
- Sepsha, Ike. _____. *Bank Sampah Inovasi Unik Untuk Atasi Permasalahan Sampah di Indonesia*. <http://forum.voi.co.id>
- Taufiko. 2008. *Sampah Berkontribusi Terhadap Teerhadap Pencemaran Sumber Daya Air*. <http://ngabandung-an.blogspot.com>
- Santoso, Urip. 2009. *Penangan Sampah untuk Menuju Kota Bersih & Sehat*. <http://www.uripsantoso.wordpress.com>
- Wibowo, Agung. 2009. *Kondisi Persampahan Kota di Indonesia*. <http://blog.uns.co.id>
- Wikipedia Bahasa Indonesia. _____. *Sampah*.

Wikipedia Bahasa Indonesia._____. Pengelolaan Sampah.

Peraturan Perundang Undangan

UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kota Bandung No.3 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan

Surat Kabar

Marlia, Lia. 2011. Bandung Lautan Sampah di Depan
Mata. Pikiran Rakyat (6 Juni 2011)